

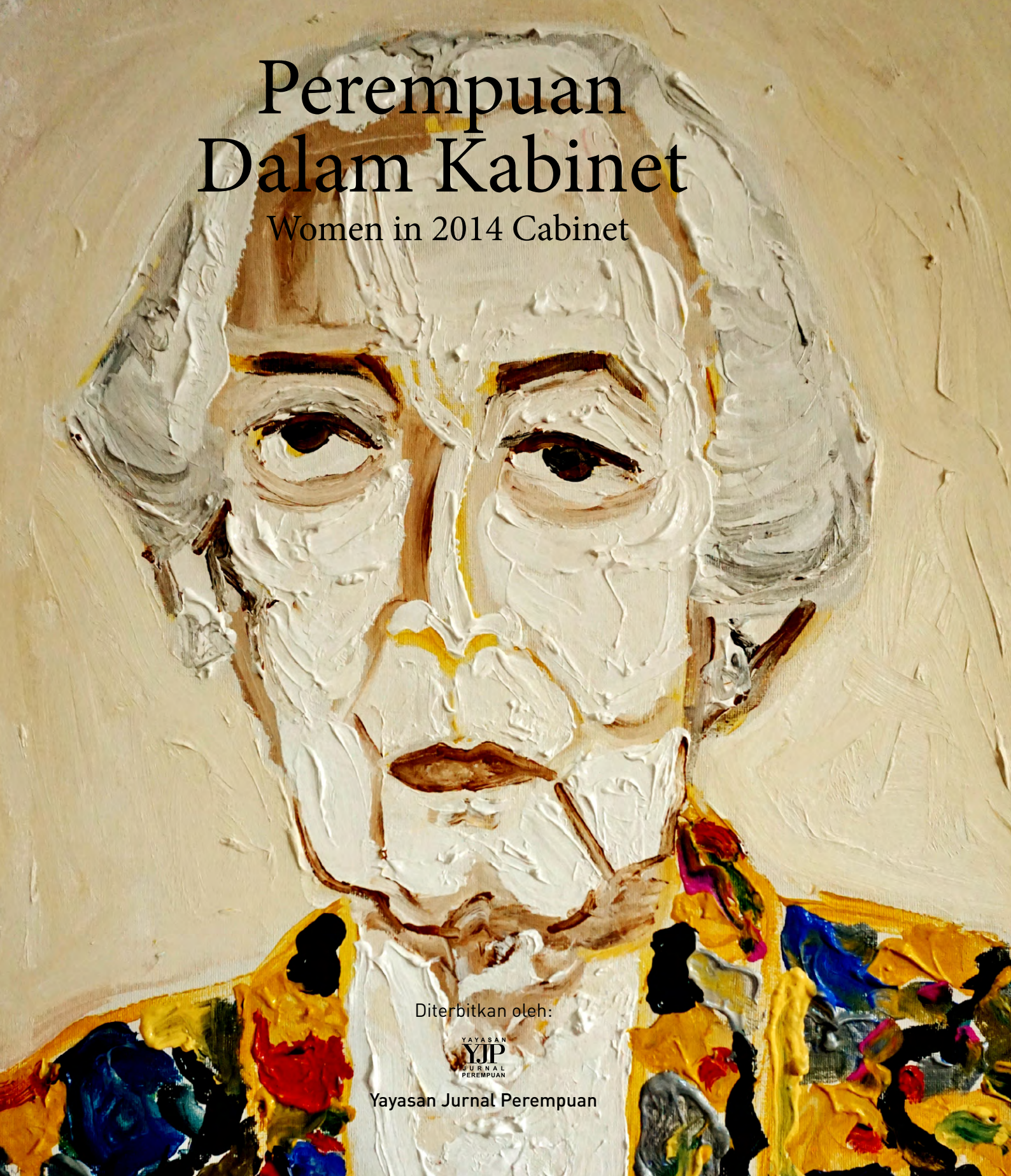
Perempuan Dalam Kabinet

Women in 2014 Cabinet

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

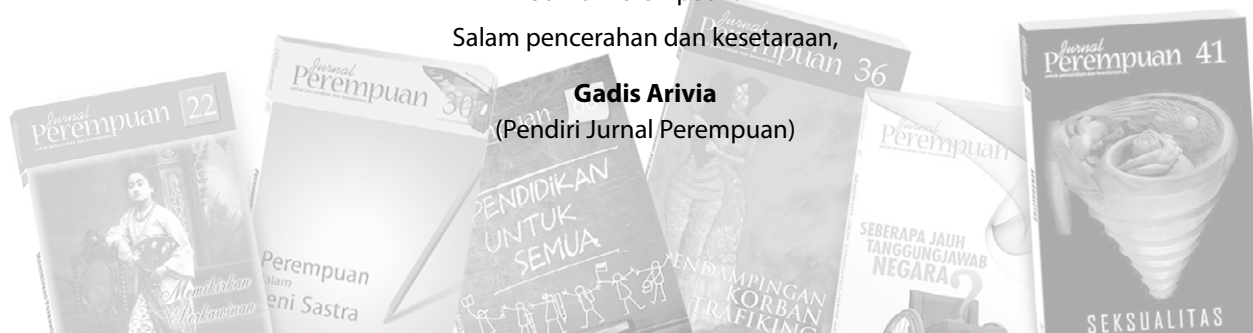
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, November 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan" vii-viii

Artikel / Articles

- *Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan / Political Engineering for Women in Indonesian Governance* 257-264
Philips J. Vermonte
- *Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi / Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy* 265-270
Mariana Amiruddin
- *Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern / Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics* 271-277
Ryan Sugiarto
- *Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja / Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet* 279-287
Triyono Lukmantoro
- *Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung / Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election* 289-306
Kurniawati Hastuti Dewi
- *Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik / Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics* 307-315
Robert Endi Jaweng
- *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan / Raison d'etre of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance* 317-326
Dewi Candraningrum

Wawancara / Interview

- *Nafsiah Mboi: "Sikap Tegas Perlu, Tetapi Penguasaan Materi Juga Penting" / Nafsiah Mboi: "Assertiveness is necessary but competence is also crucial"* 327-332
Anita Dhewy

Kata dan Makna / Words and Meanings 333-334

Profil / Profile

- *Yohana Yembise: Perempuan Punya Peran Meningkatkan Ekonomi Keluarga / Yohana Yembise: Women have significant roles in increasing family's incomes"* 335-339
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- *Bagaimana Linda Gumelar Memimpin Kementerian? / How Linda Gumelar leads the Ministry?* 341-343
Nadya Karima Melati

“Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan”

Sirimavo Bandaranaike terpilih menjadi perempuan pertama di dunia yang menjadi Perdana Menteri di Sri Lanka di tahun 1960. Sejak saat itu kurang dari 80 perempuan dari belahan dunia lain mencapai posisi eksekutif baik sebagai menteri, perdana menteri atau presiden. Di tahun 1990 setidaknya ada 26 perempuan yang menduduki posisi eksekutif dalam kabinet-kabinet negara-negara di dunia, yang kemudian angkanya naik menjadi 37 perempuan di tahun 2000—yaitu mengalami kenaikan tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 60-an, 70-an, dan 80-an (UNDP, *Gender Leadership in Executive Report*, 2013). Meskipun demikian masih banyak negara yang harus bekerja keras untuk meruntuhkan “atap kaca” (kerap disebut sebagai *glass ceiling*). Atap kaca benar-benar pecah di Finlandia dimana tiga perempuan berada dalam pucuk pemimpin eksekutif. Jumlah perempuan dalam parlemen Denmark adalah 49 persen tercatat di akhir tahun 2013, demikian juga Swedia sejumlah 42 persen, angka yang sangat tinggi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sedikit retak di Inggris, dengan Margaret Thatcher menjadi contoh perdana menteri perempuan terkuat di jamannya. Dan atap kaca masih benar-benar utuh, dan tak pecah, karena Hillary Clinton gagal menjadi Presiden di Amerika. Kajian *Jurnal Perempuan* 83 kali ini akan mengevaluasi kembali sistem politik, sistem pemerintahan, stereotip perempuan pemimpin, dan pemahaman atas karakteristik dan kepribadian pemimpin dari kaca mata ilmuwan politik, pemerintahan dan sosiolog dalam sumur paradigma filsafat feminisme.

Representasi perempuan dalam politik sesungguhnya tidak boleh hanya melulu pada persoalan gender (secara esensial menyangkut “kuota perempuan”), tetapi harus juga merangsek dalam sistem politik dan sistem pemerintahan, dalam

konteks internasional dan nasional atas posisi profesional politisi perempuan. Ini memiliki makna lebih luas lagi, yaitu **pengarusutamaan gender dalam sistem pandangan dunia politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan**. Kajian ini menyadari bahwa sistem pandangan dunia politik kenegaraan, eksekutif dan birokrasi masih menampilkan wajah lama yang melanggengkan ketidakadilan gender. Wajah kabinet baru Indonesia tahun 2014-2019 akan dikaji secara lebih spesifik dari perspektif individual dengan memperhatikan konteks profesi, struktur kekuasaan, dan karakteristik profesi perempuan yang sesungguhnya “berbeda” dari laki-laki, dan pada skala tertentu, atau lebih sering, perempuan dipaksa menjadi “laki-laki” dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*). Tata kelola pemerintahan yang mempromosikan kesetaraan gender menyadari perbedaan karakteristik ini dan tidak memaksakan generalisasi dalam pandangan filosofisnya. Dunia mencatat bahwa perempuan dapat lebih mudah menguasai level parlemen daripada level eksekutif. Padahal level kepresidenan memiliki otoritas lebih tinggi dan lebih independen dalam sistem kekuasaan daripada sistem parlementer. Dalam buku terbaru karya Farida Jalalzai berjudul *Shattered, Cracked or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide* (Oxford University Press, 2013), dia menemukan lebih dari 300 perempuan dunia telah menjalankan tugas-tugas eksekutif dan hanya 21 perempuan yang mampu menduduki posisi tertinggi. Kajian ini juga mengungkap hanya 16 perempuan yang bisa mencapai posisi kepresidenan. Dari angka ini masih banyak perempuan yang hanya menjadi bayang-bayang dari pemimpin laki-laki di sampingnya, atau ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau klan keluarganya. Meskipun banyak tantangan yang melawan perempuan naik dalam posisi

kekuasaan kenegaraan, tetapi perempuan dapat menghadapi kesulitan ini, terutama dalam konteks politik yang tidak stabil dimana perempuan memiliki hubungan darah dengan oligarki kekuasaan rezim tertentu. Meskipun ini merugikan perempuan, tetapi paling tidak perempuan mendapatkan pengalaman-pengalamannya yang berbeda dari sebelumnya dimana perempuan merupakan lawan-inferior yang tidak berpengalaman sama sekali dalam hal politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan. Dalam bukunya Jalalzai menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan lebih bersifat konsensual daripada laki-laki, dimana laki-laki mempertahankan kontrol dan kekuasaan (2013: 43). Hal ini juga menjelaskan bagaimana kemudian kepemimpinan perempuan dalam eksekutif lebih bersifat lunak dan kolaboratif. Temuan Jalalzai ini kemudian mengkonfirmasi bagaimana kepemimpinan juga tak lepas dari karakter gender masing-masing individu, sebagai sebuah temuan yang umum, meskipun tidak bisa dipaksakan menjadi untuk "siapa saja" karena sifatnya yang kontekstual.

Beberapa kajian sebelumnya mewartakan bahwa banyak kepemimpinan perempuan dalam posisi eksekutif baik level nasional, provinsi dan kabupaten merupakan kabar gembira, karena menceritakan keberhasilan-keberhasilan yang diraih perempuan pemimpin. Indonesia mencatat Walikota Surabaya Risma, Bupati Kebumen Rustri, meskipun juga mencatat kegagalan terbesar Gubernur Banten Ratu Atut yang terjerat kasus mega korupsi demikian juga Bupati Karanganyar Rina Iriani. Partisipasi politik dan kenegaraan perempuan sebagaimana laki-laki juga mengalami naik-turunnya. Catatan-catatan korupsi juga menjadi pekerjaan tersendiri dalam diskursus kepemimpinan perempuan dalam lingkup eksekutif. Kajian menunjukkan bahwa perempuan

harus berjuang lebih keras dari laki-laki dalam meraih posisi eksekutif, tidak hanya latar belakang pendidikan, lingkaran keluarga, pengaruh keluarga, dan lain-lain, tetapi juga harus berjuang melawan segala "prasangka" bahwa perempuan tidak memiliki "kemampuan asal" (kerap disebut takdir) dalam memimpin. Asia dan Amerika Latin adalah rumah dimana tradisi atas perempuan yang tidak memimpin ini dipelihara. Hubungan darah, situasi tidak stabil, dan transisi demokrasi dalam banyak kasus telah menolong perempuan memasuki tangga paling puncak kekuasaan eksekutif—sebagai janda perdana menteri atau sebagai anak perempuan seorang presiden yang terbunuh, misalnya, kemudian perempuan duduk dalam kursi kekuasaan, kemudian mengenal secara tak sengaja tata kelola pemerintahan. Temuan ini menunjukkan betapa lemahnya perempuan yang menjadi pemimpin berasal dari akar organik, karena dia memang benar-benar mampu dan memiliki kapasitas menjadi pemimpin. Bahkan juga dipercayai, bahwa meskipun perempuan memimpin, dia selalu tak dipercaya akan berhasil memimpin. *Jurnal Perempuan* 83 edisi *Status Perempuan dalam Kabinet* ini akan meneliti dan mengulas bagaimana menjelaskan mekanisme politik bagi perempuan untuk dapat mencapai jaring dalam habitus tata kelola pemerintahan, baik secara filosofis, kesejarahan, paradigmatik dan praktis, terutama bagi politisi perempuan rentan yang berasal dari keluarga tidak stabil secara ekonomi-politik dan tidak masuk dalam lingkaran oligarki politik tertentu atau dapat kita sebut sebagai "politisi perempuan organik". Negara dan partai politik bertanggung-jawab atas para perempuan aktivis politik brilian tersebut dengan kehendak-kehendak politiknya, baik formal via kebijakan dan informal via praktik budaya politik. (Dewi Candraningrum, *Pemimpin Redaksi*).

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Philips J. Vermonte. Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS. Jl. Tanah Abang III No. 23-27

Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Political Engineering for Women in Indonesian Governance

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 257-264, 7 gambar, 3 tabel, 11 daftar pustaka.

The rising number of women in parliament is a vital entry point to involve more women politics. This factor opens discourse, engagement and active participation that can elevate women's political bargain in negotiation room. It is in the long run will affect the embodiment of critical mass which is believed to increase factor of women's representation in policies decision. Mainstreaming gender in governance shall be supported by political engineering, institutional setting, roles of the game, and an open and democratic system. Democratic political setting is the pre-requisite to create equal representation and participation for women and other minorities group in governance politics.

Keywords: women, politics engineering, critical mass, governance.

Peningkatan persentase perempuan dalam parlemen adalah *entry point* bagi keterlibatan yang lebih aktif dan konkrit bagi kelompok perempuan secara keseluruhan. Peningkatan ini akan membuka ruang diskursus dan menguatnya posisi tawar kepentingan kelompok perempuan dengan membentuk *critical mass* yang diyakini penting untuk bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Faktor kultural penting dalam mempengaruhi *politics of presence* dari kelompok perempuan. Perihal pengarusutamaan gender dalam tata kelola ini harus didukung dengan *setting* kelembagaan, yang berwujud pada aturan main, *institutional engineering* dan pembuatan serta penjaminan atas aturan main politik yang lebih terbuka dan demokratis. Setting politik demokratis adalah prasyarat terciptanya representasi dan partisipasi kelompok perempuan secara kuantitatif dan substantif dalam tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: perempuan, rekayasa politik, massa kritis, tata kelola.

Mariana Amiruddin. Komisioner Komnas Perempuan. Jl. Lathuhary No.4B, Menteng, Jakarta 10310. Telp.: (021) 3903963

Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi

Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 265-270, 1 tabel, 3 daftar pustaka.

Indonesia urgently needs national women's machinery, like ministry of women and commission for women. Beijing Platform for Action had been adopted by the fourth conferenc of women in September 1995 giving specific attention to national women's machinery in implementing gender mainstreaming at all levels in national development. This machine coordinates and supports all policies regarding strategic decisions and real actions. In July 2004 ECOSOC adopt resolution on national women's machinery as key actor in bureaucracy reformation. The resolution recommends that national women's machinery is being put at the highest level to invest authority and equal power to fulfill the mandates.

Keywords: national women's machinery, women ministry, commission for

women.

Indonesia masih membutuhkan "*National Women's Machinery*"— seperti institusi berbentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan. Beijing Platform for Action yang diadopsi oleh Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (September 1995) memberikan perhatian khusus tentang pentingnya "mesin nasional" dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan. Hal ini mendefinisikan peran utama mesin nasional berupa pusat kebijakan unit koordinasi dalam pemerintahan yang tugas utamanya adalah: mendukung pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan tujuan strategis yang diusulkan dengan tindakan nyata. Pada bulan Juli 2004, ECOSOC bahkan mengadopsi resolusi ini untuk memperkuat peran "mesin nasional" sebagai aktor kunci dalam mempromosikan pengarusutamaan gender. Komisi dalam konferensi tersebut merekomendasikan agar "mesin nasional" ditempatkan pada tingkat tertinggi pemerintahan dan diinvestasikan dalam bentuk kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi mandat mereka.

Kata Kunci: mesin nasional, Kementerian Perempuan, Komnas Perempuan.

Ryan Sugiarto. Program Magister Sains Psikologi, Universitas Gajah Mada . Jl. Sosio Humaniora Bulaksumur Yogyakarta 55281. Telp. +62 274 550435

Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern

Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 271-277, 12 daftar pustaka.

Genealogy and history of queens in Nusantara had been written in golden ink. Their histories across Nusantara were not only an accumulation of wives or ruler, but also inhibited the magic-realism of modern Indonesian society. However, the minimum or rare documents of Nusantara's women leadership had blurred their real representation and strong leadership. This paper investigates the history, roles, status and profiles of women's leader. This paper aims to support current political situation specifically on the tradition of writing woman's her-stories. From this perspective legitimacy of power from history are taken to support women's leadership in current modern Indonesia state.

Keywords: queen, Nusantara, myth, state.

Sejarah panjang kekuasaan dan kepemimpinan perempuan nusantara mencatat hasil yang gemilang. Sejarah perempuan penguasa tidak hanya menempatkan dirinya sebagai ratu atau penguasa kerajaan, tetapi juga memenuhi ruang kesadaran magis masyarakat melalui mitos. Namun minimnya literasi mengenai peran dan sejarah kuasa perempuan yang ditulis oleh sejarawan, membuat bangsa ini seolah tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Tulisan ini bermaksud mengkaji kuasa perempuan nusantara dan sejarah kekuasaan perempuan Indonesia yang berlangsung berabad silam dan mitos yang hidup hingga saat ini. Tulisan ini diharapkan mampu memberi ruang untuk menengahkan pengalaman perempuan nusantara memimpin negeri. Sekaligus mendorong kemungkinan penulisan sejarah yang berpihak pada perempuan. Sehingga sebagai sebuah bangsa, memiliki kajian yang berpijak pada khasanah perempuan nusantara untuk memberi dasar pada kekuatan politik perempuan hari ini.

Kata kunci: ratu, Nusantara, mitos, negara.

Triyono Lukmantoro. Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang. (Jalan Prof. Soedharto, SH Tembalang), Semarang, Jawa Tengah 50275. Telepon:+62 24 8414513

Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja

Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 279-287, 25 daftar pustaka.

Media representations of women who have positions as ministers in President Joko Widodo's Kabinet Kerja become phenomenon. On one side, media exposes aspects of successful side of female ministers. Media cited the statement of Presiden Jokowi that there are two "first woman" as appreciation. But, on the other side, media representations have masculinity character. For female minister who has "unique body performance", the exposure of media are so excessive. Media had been trapped in the calculation of news values as reference for gathering news. The news values have been controlled by masculinity discourse that legitimate patriarchal regime of truth.

Keywords: media, representations, woman, masculinity.

Representasi media terhadap kehadiran perempuan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi fenomena tersendiri. Media banyak menyoroti sisi keberhasilan kalangan perempuan menteri. Media mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan ada dua "Perempuan Pertama" untuk memberi apresiasi. Namun, pada sisi yang lain, representasi media menunjukkan watak maskulinitas. Untuk perempuan menteri tertentu yang dianggap memiliki "penampilan tubuh yang unik", maka media memberikan sorotan yang berlebihan. Di sinilah media terjebak dalam nilai berita yang menjadi acuannya sendiri. Padahal nilai berita itu sudah dikontrol oleh wacana maskulinitas yang membenarkan rezim kebenaran patriarki.

Kata kunci: media, representasi, perempuan, maskulinitas

Kurniawati Hastuti Dewi. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl.Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710. Telp.(021) 5225711, 5251542

Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 289-306, 4 tabel, 44 daftar pustaka.

This paper shows that the role and position of Indonesian women in local governance are improving gradually since the implementation of direct elections in 2005. The "structural opportunities" for women to be elected as local leader have increased under the direct elections. The number of women elected as local leaders has risen significantly during 2005-2014 periods. Female local leaders' profiles are diverse in terms of their socio-political background, individual capital and political parties, reflecting a new typology of female local leaders. The presence of female local leaders does not necessarily mean that they always advocate for women issues in their policy line, as this ideal condition depends on other influential factors. And yet, this paper suggests the declining trend of participation and opportunities of women in local governance as the new Local Government Act No. 23/2014 adopts the election of local government head via the Regional People's Representative Council to replace the earlier mechanism of direct election.

Keywords: women, governance, local direct election.

Tulisan ini menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia semakin membaik sejak diberlakukannya Pilkada langsung tahun 2005. Pilkada langsung telah menyediakan "struktur kesempatan" yang lebih besar kepada perempuan untuk menjadi pemimpin politik di daerah. Jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah meningkat signifikan selama kurun waktu 2005-2014. Profil perempuan pemimpin daerah lebih beragam dari segi latar belakang sosial-politik, modal individu, dan partai pengusung yang memperlihatkan kemunculan tipe-tipe baru perempuan pemimpin daerah. Keberadaan perempuan pemimpin daerah tidak serta merta menjamin kinerja dan pemihakan terhadap berbagai persoalan perempuan di daerah, karena hal ini tergantung pada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Namun demikian, tulisan ini juga menengarai tren kemunduran peluang dan partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan diberlakukannya kembali mekanisme Pilkada melalui DPRD, sebagaimana tercantum dalam UU Pemerintahan Daerah terbaru No. 23/2014.

Kata Kunci: perempuan, tata kelola pemerintahan, Pilkada langsung (Pemilihan Kepala Daerah).

Robert Endi Jaweng. Direktur Eksekutif KPPD, Jakarta. Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980. Telp.: (62-21) 8378 0642/53

Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik

Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 307-315, 3 tabel, 12 daftar pustaka.

Desentralization and local autonomy marks the shift of power from centre to the locals. In the political transition landscape, the actual cause in Indonesia is the power relations that should investigate further dimension of gender, social, politics, and economy. Within this network and framework, women's leadership are hoped to nurture equality and prosperity for those being othered by development and growth. This paper concludes that executive leadership that promotes gender equality shall, foremost, promote concept of women's leadership which are not only due to inheritance but basic political infrastructure.

Keywords: decentralization, bureaucracy, female local leaders.

Desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya tak sekadar menandai hadirnya momentum baru perubahan tata kelola pemerintahan di aras lokal. Dalam lanskap transisi politik, seperti kasus aktual di Indonesia hari ini, desentralisasi dan otonomi tersebut mesti lebih jauh dan mendasar lagi menjadi struktur perubahan itu sendiri, dan dalam tarikan nafas yang sama membuka kesempatan bagi transformasi struktural dan penataan ulang relasi kuasa (*power-relations*) pada matra gender, sosial, politik, ekonomi. Hanya pada struktur demikian, kepemimpinan perempuan menjadi lebih bermakna, sekaligus menjadi humus bagi tumbuh-mekarnya tokoh-tokoh perempuan di berbagai pelosok negeri untuk mengambil peran historis di daerah. Artikel ini bertolak dari proposisi dasar: meski hari ini muncul sederet tokoh perempuan memegang tampuk kepemimpinan eksekutif, namun mereka belum sepenuhnya melahirkan dan atau dilahirkan dalam ruang transformasi struktural dan tata relasi kuasa yang berubah.

Kata Kunci: desentralisasi, birokrasi, kepala daerah perempuan.

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi *Jurnal Perempuan*.
Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan,
12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

***Raison d'être* Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet
Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola
Pemerintahan**

***Raison d'être* of Mainstreaming Gender in 2014-2019
Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 317-326, 2 gambar,
18 daftar pustaka.

This research focuses on the presence of women in the Executive via institutionalism approach that methodologically realize that women's position in public is critically under-represented. Approach being employed is defending women and other minorities groups. This approach assume: 1) existential reason of politics is too masculine and unequally distributed among groups; 2) appreciating informal practice held by minorities groups; 3) committed to mainstreaming equality in supporting groups such as women, diffable groups, LGBT, and ecological justice.

Keywords: Executive, women, minorities, governance.

Kajian ini meletakkan fokus pada kehadiran perempuan dalam eksekutif pemerintahan, yaitu kabinet dengan menggunakan pendekatan institutionalisme feminis yang secara metodologis dan klinis melacak, mencurigai, dan menerangkan bahwa akses dan peran perempuan dalam institusi eksekutif amat terbatas dan berada di bawah rerata adil. Pendekatan ini adalah pendekatan subjektif yang secara aksiologis berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas lain (ras-etnis, kelas sosial politik agama, orientasi seksual, difabel, dan lain-lain). Pendekatan ini memiliki tiga matra keberpihakan: pertama, asumsi eksplisit bahwa peraturan dan praktek yang menjadi *raison d'être* (alasan eksistensial) praktek politik amat maskulin dan mengabarkan ketidaksetaraan relasi kekuasaan, secara spesifik mengkonstruksi (!)iyian dalam kata kunci gender, ras, etnis, agama, dan kelas sosial-ekonomi. Kedua, memberikan penghargaan pada praktek-praktek informal dari proses-proses komunikasi dan tata-kelola politik yang tidak termaktub dalam paradigma modern. Perihal ini secara spesifik menginduk pada praktek-praktek masyarakat adat dan perlindungan ekologis yang erat kaitannya dengan perikehidupan perempuan dan para liyan. Ketiga, komitmen pada pengarusutamaan, pendekatan ini menyadari bahwa dua perihal tersebut tidak akan teratasi tanpa ada komitmen politik atas tindakan-tindakan pengarusutamaan, baik gender, difabel, ekologis, dan lain-lain.

Kata kunci: Eksekutif, perempuan, minoritas, tata kelola.

Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election

Kurniawati Hastuti Dewi

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Jl.Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710. Telp.(021) 5225711, 5251542

kurniawati.dewi@yahoo.com

Naskah Diterima 4 Agustus 2014. Direvisi 25 Agustus 2014. Disetujui: 25 September 2014

Abstract

This paper shows that the role and position of Indonesian women in local governance are improving gradually since the implementation of direct elections in 2005. The "structural opportunities" for women to be elected as local leader have increased under the direct elections. The number of women elected as local leaders has risen significantly during 2005-2014 periods. Female local leaders' profiles are diverse in terms of their socio-political background, individual capital and political parties, reflecting a new typology of female local leaders. The presence of female local leaders does not necessarily mean that they always advocate for women issues in their policy line, as this ideal condition depends on other influential factors. And yet, this paper suggests the declining trend of participation and opportunities of women in local governance as the new Local Government Act No. 23/2014 adopts the election of local government head via the Regional People's Representative Council to replace the earlier mechanism of direct election.

Keywords: women, governance, local direct election.

Abstrak

Tulisan ini menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia semakin membaik sejak diberlakukannya Pilkada langsung tahun 2005. Pilkada langsung telah menyediakan "struktur kesempatan" yang lebih besar kepada perempuan untuk menjadi pemimpin politik di daerah. Jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah meningkat signifikan selama kurun waktu 2005-2014. Profil perempuan pemimpin daerah lebih beragam dari segi latar belakang sosial-politik, modal individu, dan partai pengusung yang memperlihatkan kemunculan tipe-tipe baru perempuan pemimpin daerah. Keberadaan perempuan pemimpin daerah tidak serta merta menjamin kinerja dan pemihakan terhadap berbagai persoalan perempuan di daerah, karena hal ini tergantung pada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Namun demikian, tulisan ini juga menengarai tren kemunduran peluang dan partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan diberlakukannya kembali mekanisme Pilkada melalui DPRD, sebagaimana tercantum dalam UU Pemerintahan Daerah terbaru No. 23/2014.

Kata Kunci: perempuan, tata kelola pemerintahan, Pilkada langsung (Pemilihan Kepala Daerah).

Pendahuluan

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan mengenai bagaimana wajah perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia sejak era baru otonomi daerah diberlakukan pada tahun 1999 sampai dengan 2014. Di Indonesia, sejak demokratisasi menyusul lengsernya Suharto pada 1998, tata kelola pemerintahan daerah memasuki babak baru. Peraturan perundangan yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dari praktik demokrasi perwakilan (kepala daerah dipilih di dalam dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD), menjadi ke demokrasi langsung yaitu rakyat secara langsung dilibatkan dalam pemungutan suara untuk memilih kepala daerahnya. Salah satu hal menarik untuk dicermati tetapi pada umumnya luput

dari perhatian, adalah sejauh mana dampak dari perubahan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal mekanisme pemilihan kepala daerah, terhadap kemunculan perempuan sebagai pemimpin politik lokal. Kajian seperti ini penting dilakukan mengingat selama ini kajian mengenai tata kelola pemerintahan daerah, umumnya berfokus pada dampak perubahan berbagai perundangan tentang pemerintahan daerah terhadap hubungan pusat-daerah, konsekuensi struktur-kelembagaan, dampaknya terhadap partisipasi masyarakat, termasuk perubahan kinerja pemerintahan daerah. Meskipun hal-hal seperti itu tidak bisa disepelekan, tetapi terdapat hal yang sangat penting dari sisi persektif gender, yang mesti dilihat secara kritis. Perempuan secara umum seringkali berada dalam posisi marginal, tidak banyak dilibatkan, dan bahkan

suara perempuan cenderung diabaikan dalam proses pengambilan keputusan publik. Pada umumnya, proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik, didominasi oleh laki-laki, tidak terkecuali di level daerah.

Kritik semacam ini kemudian mendorong munculnya paradigma baru dalam *governance* (tata kelola pemerintahan) supaya kepentingan, suara, aspirasi, akses dan kontrol perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan berbagai kebijakan terakomodasi. Hal ini melahirkan perspektif "*gender and governance*" yang menghendaki partisipasi perempuan (sejajar dengan laki-laki) agar hak perempuan untuk bersuara diakomodir; pada akhirnya nanti diharapkan tata kelola pemerintahan akan lebih responsif terhadap perbedaan kebutuhan dan situasi perempuan dan laki-laki, sehingga berkontribusi mewujudkan kesetaraan gender.¹ Hampir sama dengan yang disebutkan terdahulu, perspektif "*gender-sensitive governance*" menghendaki kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan menjadi perhatian utama dalam praktik tata kelola pemerintahan; kebijakan dan peraturan perundangan yang seharusnya mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, kepentingan, prioritas, tanggung jawab serta ketidaksetaraan kondisi sosial dan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.²

Dengan menyadari adanya kritik besar mengenai pentingnya perspektif gender dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka kehendak tulisan ini untuk menyajikan analisis mengenai sejauhmana perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, menjadi relevan dan urgen. Tulisan ini difokuskan untuk: *pertama*, menganalisis dampak perubahan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal mekanisme pemilihan kepala daerah, terhadap kemunculan para perempuan sebagai pemimpin daerah (bupati/walikota/gubernur) sejak era baru otonomi daerah pada tahun 1999 sampai dengan 2014; *kedua*, menganalisis profil dan latar belakang para perempuan pemimpin daerah; *ketiga*, melihat sejauh mana kinerja atau kebijakan selama masa kepemimpinan mereka. Poin ketiga ini terkait dengan ekspektasi normatif yang melekat pada seorang perempuan pemimpin politik. Seperti catatan Joni Lovenduski dalam mengevaluasi peran perempuan anggota parlemen Inggris tentang sejauhmana dampak para perempuan anggota parlemen dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengadopsi perspektif perempuan,³ atau juga Haleh

Afshar yang mengharapkan potret ideal para politisi perempuan di Syria dan Iran sebagai aktor/agen politik yang memperjuangkan hak-hak perempuan.⁴ Perempuan memiliki pengalaman hidup yang unik sebagai konsekuensi atas peran biologisnya untuk hamil, melahirkan, menyusui dan secara alamiah menjadi lebih dekat dengan perempuan dan anak-anak. Maka diasumsikan perempuan sendirilah yang paling mampu memahami dan mengerti kebutuhan serta kepentingan pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Dengan demikian, para perempuan pemimpin diharapkan memiliki sensitivitas yang lebih terhadap permasalahan perempuan dan anak, mampu memperjuangkan kebijakan yang pro kebutuhan perempuan dan anak. Jadi, salah satu bagian dari tulisan ini akan mengkaji sejauhmana para perempuan pemimpin politik yang terpilih di daerah mampu menjalankan mandat normatif ini.

Tulisan ini terbagi menjadi empat bagian. Setelah pengantar ini, bagian berikutnya akan memaparkan perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia 1999-2014, dan menganalisis dampaknya terhadap kemunculan para perempuan pemimpin politik di daerah. Bagian kedua akan menganalisis profil dan latar belakang para perempuan pemimpin daerah, disusul dengan bagian ketiga yang menganalisis kebijakan mereka ketika menjadi pemimpin politik di daerah khususnya terkait persoalan perempuan dan anak. Bagian keempat adalah penutup yang menyajikan temuan, kesimpulan, dan proyeksi mengenai tren kepemimpinan perempuan di daerah di masa datang dan agenda penting yang dapat diperjuangkan.

Dampak Pilkada Langsung terhadap Peta Politik Perempuan

Selama kurun waktu 1999-2014, sudah terjadi tiga kali perubahan peraturan perundangan yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah dalam payung besar kebijakan desentralisasi. Berturut-turut adalah berlakunya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, digantikan dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014 yang disahkan pada sidang Paripurna DPR 25 September 2014. Secara detail akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, pendekatan sentralistik yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan daerah selama masa Orde Baru (1966-1998) dengan UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, digantikan

dengan UU No. 22.1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jika UU No. 5/1974 mengatur bahwa kepala daerah kabupaten/kota/provinsi diusulkan oleh DPRD untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan presiden, maka UU No. 22/1999 mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis oleh DPRD, dan presiden sekadar mengesahkan dan melantik. Intinya, kedua Undang-Undang ini menganut demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala daerah, karena proses pemilihan kepala daerah dilakukan oleh dan berlangsung di dalam DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kemunculan para perempuan pemimpin daerah? Dari penelusuran data yang penulis lakukan, di bawah UU No 5/1974 yaitu selama periode 1974-1998 dimana kepala daerah diusulkan oleh DPRD untuk disetujui Presiden (Suharto), hanya ada dua perempuan yang terpilih sebagai pemimpin tertinggi di daerah yaitu: Tutty Hayati Anwar sebagai Bupati Majalengka (1998-2003) dan Molly Mulyahati Djubaedi sebagai Walikota Sukabumi (1998-2003). Langkanya perempuan yang terpilih menjadi pemimpin daerah selama masa Orde Baru, bisa jadi merupakan dampak dari kebijakan Suharto yang melakukan depolitisasi sistematis peran dan posisi perempuan Indonesia melalui ideologi gender tertentu. Suharto menempatkan diri sebagai 'bapak pembangunan' yang mengharuskan pengabdian kaum perempuan baik sebagai ibu maupun istri dalam pembangunan.⁵ Julia Suryakusuma menyebut ideologi ini sebagai "*state ibuisim*" yang bertumpu pada paham paternalistik dan memposisikan laki-laki sebagai elemen inti dari negara, sementara perempuan merupakan elemen sekunder yang cukup berkiprah di dalam keluarga. Dalam konstruksi ideologi gender sedemikian, suami diharapkan berperan politik aktif di luar rumah (dilambangkan oleh sosok Suharto) sementara istrinya (dicontohkan oleh peran Ibu Tien Suharto) menjadi pendamping dan penopang suami untuk menciptakan keluarga yang 'stabil' sebagai landasan bagi terwujudnya stabilitas politik dan negara yang kuat.⁶

Cara yang ditempuh oleh rezim Orde Baru untuk memarginalkan perempuan dari dunia politik praktis adalah dengan membuat program yang difokuskan pada pemupukan peran perempuan sebagai ibu dan istri melalui program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sejak tahun 1972 dengan sasaran perempuan perdesaan,⁷ mengontrol loyalitas perempuan kelas menengah perkotaan melalui

Dharma Wanita yang didirikan 1974.⁸ Melalui kedua jenis program tersebut, perempuan dituntut untuk loyal tetapi apolitis sebagai ibu atau istri demi mendukung karier suami untuk menyukseskan tugas negara. Diliputi konteks politik yang cenderung memarginalkan peran perempuan dalam politik, konsekuensinya akan sulit muncul perempuan berkiprah sebagai pemimpin politik di daerah. Apalagi di bawah UU No. 5/1974 Presiden Suharto, dengan ideologi gender yang memarginalkan peran politik perempuan, menjadi penentu pengangkatan seorang kepala daerah sementara DPRD sekadar mengusulkan nama kepada Presiden. Sementara itu, setelah berlakunya UU No. 22/1999 dimana pemilihan kepala daerah dilakukan lebih demokratis di dalam DPRD dan campur tangan Presiden lebih berkurang, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi pemimpin daerah. Terdapat lima perempuan yang terpilih sebagai pemimpin daerah selama pelaksanaan UU No. 22/1999 yang terdiri dari empat bupati dan satu gubernur yaitu: Rustriningsih sebagai Bupati Kebumen (2000-2005), Haeny Relawati Rini Widayastuti sebagai Bupati Tuban (2001-2006), Rina Iriani sebagai Bupati Karanganyar (2003-2008), Tutty Hayati Anwar sebagai Bupati Majalengka (2003-2008), dan satu wakil gubernur yaitu Atut Chosiyah sebagai wakil gubernur Banten (2001-2006). Naiknya jumlah kepala daerah perempuan yang terpilih melalui mekanisme pemilihan melalui DPRD dengan taraf campur tangan presiden yang menurun, menunjukkan bahwa apabila kekuasaan untuk menentukan kepala daerah tidak didominasi oleh satu figur atau lembaga, maka peluang politisi perempuan untuk maju mencalonkan diri dan untuk terpilih semakin besar.

Kedua, kenaikan signifikan jumlah kepala daerah perempuan baru terjadi setelah diundangkannya UU No.32/2004 yang memperkenalkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat Pilkada langsung) dimana rakyat langsung menggunakan hak pilihnya untuk menentukan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini efektif berlaku sejak tahun 2005. Paling tidak, sesuai dengan data yang penulis peroleh dari Kementerian Dalam Negeri, sejak 2005-2008 saja terdapat 466 Pilkada langsung dimana 355 pemilihan berlangsung di luar Jawa dan 111 pemilihan berlangsung di Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Yogyakarta).⁹ Selama periode dan jumlah tersebut, persentase pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang terdiri dari salah satunya perempuan (perempuan pada posisi sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah baik bupati/walikota/gubernur) yang terpilih di Jawa adalah 11 pasangan atau 9.91 persen; sementara itu di luar Jawa ada 15 pasangan atau 4.22 persen.¹⁰

Jadi, secara kasat mata, mekanisme Pilkada langsung untuk pemilihan kepala daerah baik di kabupaten/kota/provinsi, telah membuka ruang kesempatan yang lebih besar untuk perempuan mencalonkan diri kemudian terpilih sebagai pemimpin politik daerah. Maka tidak berlebihan jika penulis berpendapat--dengan meminjam istilah Pippa Noris mengenai "struktur kesempatan" ("*the structure of opportunities*") ketika dia menjelaskan salah satu komponen penting dalam rekrutmen anggota legislatif¹¹-- bahwa 'struktur kesempatan' bagi kaum perempuan Indonesia untuk dapat direkrut dan berkiprah secara aktif dalam politik di daerah lebih meningkat dengan berlakunya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dibawah UU No.32/2004. Melalui mekanisme Pilkada langsung, arena perempuan untuk bermanuver politik lebih besar mengingat kecenderungan oligarki elit/oligarki partai di DPRD,¹² serta dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan strategis di DPRD maupun dalam internal partai-partai politik di Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa mekanisme Pilkada langsung lebih 'ramah' terhadap perempuan, dibandingkan dengan pemilihan melalui DPRD.

Selain perubahan perundangan menyangkut pemilihan kepala daerah yang lebih 'ramah' perempuan di daerah dengan berlakunya UU No.32/2004, perubahan kebijakan pemerintah Era Reformasi ke arah pemenuhan--meminjam Maxine Molyneux "*strategic gender interest*" -- 'kepentingan strategis gender' yaitu serangkaian upaya mengatasi ketertinggalan perempuan di dalam masyarakat dengan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan,¹³ menjadi konteks penting yang memfasilitasi kiprah aktif perempuan Indonesia dalam politik pasca 1998. Sebagai contohnya, terjadi perubahan orientasi PKK dari yang semula merupakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dengan doktrin 'istri pendamping suami'. Maka sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa (1999-2001), PKK diubah menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan doktrin baru 'mitra

sejajar laki-laki', yang secara implisit mendorong perempuan menjadi subjek aktif bersama laki-laki dalam berbagai bidang.¹⁴ Konteks dukungan pemerintah yang pro kemajuan politik perempuan ini menjadi salah satu faktor penting memfasilitasi perubahan struktural, menciptakan atmosfer dan wacana politik yang lebih ramah perempuan termasuk di daerah.

Ketiga, mekanisme Pilkada langsung yang semula diatur dengan UU No.32/2004 diganti kembali dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebagaimana tercantum dalam UU No. 23/2014. Opsi ini dipilih dalam voting anggota DPR pada sidang paripurna DPR tanggal 25 September 2014. Kembalinya mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan anti-klimaks dari upaya panjang untuk meneruskan mekanisme Pilkada langsung, yang esensinya mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, sebagai salah satu pilar penting demokratisasi sejak 1998. Persiapan Rancangan Undang-Undang mengenai pemilihan kepala daerah ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2013, dan merupakan RUU inisiatif pemerintah. Pada mulanya RUU pemilihan kepala daerah versi pemerintah hendak memperkuat peran dan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga gubernur cukup dipilih oleh DPRD.¹⁵ Akan tetapi dalam perkembangannya pada bulan April 2013, pemerintah mengubah posisinya secara drastis. Dalam RUU pemilihan kepala daerah versi bulan April 2013, pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah di provinsi secara langsung untuk menguatkan posisi gubernur, sementara pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota melalui DPRD untuk menghindari konflik meluas dan mengoptimalkan fungsi pelayanan publik,¹⁶ dimana pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota/provinsi hanya untuk memilih kepala daerah saja dan tidak ada paket pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti masa lalu. Jadi ringkasnya, RUU pemilihan kepala daerah usulan pemerintah sampai dengan Juni 2013 adalah mengusulkan Pilgub langsung, sementara Pilbup/Pilwakot melalui DPRD dan tidak satu paket. Adapun peta ragam opsi yang berkembang dan posisi fraksi-fraksi di DPR terhadap RUU pemilihan kepala daerah usulan pemerintah digambarkan dalam Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1. Peta Posisi Fraksi di DPR terhadap RUU Pemilihan Kepala Daerah (Per 4 Juni 2013)

Opsi yang Berkembang/ Posisi Fraksi	Fraksi-Fraksi
Pilgub Langsung Pilbub/Pilwakot melalui DPRD	F-Partai Demokrat (tidak satu paket) F-Partai Persatuan Pembangunan (satu paket) Dewan Perwakilan Daerah, DPD (tidak satu paket)
Pilgub Langsung Pilbub/Pilwakot Langsung	F- Partai Golkar F-PDIP F-Partai Keadilan Sejahtera F-Partai Amanat Nasional (tidak satu paket) F-GERINDRA F-HANURA
Pilgub melalui DPRD Pilbub/Pilwakot Langsung	F- Partai Kebangkitan Bangsa (satu paket)

Sumber: Tabel dibuat oleh penulis berdasarkan data dasar "Tabel Posisi Pemerintah dan Fraksi-Fraksi RUU Pilkada" per 4 Juni 2013, yang diperoleh penulis dari sumber di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, tetapi tidak bersedia disebutkan identitasnya.

Melalui tabel tersebut tampak bahwa awalnya spirit untuk meneruskan Pilkada langsung untuk memilih gubernur/bupati/walikota, didukung oleh 5 fraksi di DPR yaitu F-Partai Golkar, F-PDIP, F-PKS, F-PAN, F-GERINDRA, dan F-HANURA. Namun demikian dalam perkembangannya terjadi perubahan signifikan posisi fraksi-fraksi terhadap RUU pemilihan kepala daerah terutama menjelang sidang paripurna DPR 25 September 2014. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari hasil pemilu legislatif April 2014 yang menempatkan PDIP sebagai parpol dengan kursi terbanyak di DPR periode 2014-2019 dengan 109 kursi, disusul Golkar 91 kursi, GERINDRA 73 kursi, Demokrat 61 kursi, PAN 49 kursi, PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, NASDEM 35 kursi dan HANURA 16 kursi.¹⁷ Konfigurasi baru ini memicu koalisi parpol-parpol dalam Pilpres Juli 2014 yang mengerucut pada Koalisi Merah Putih yang terdiri dari GERINDRA, Golkar, PKS, PAN, PPP, PBB, Demokrat yang mencalonkan Prabowo-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, PDIP, NasDEM, PKB, HANURA, mengusung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden dan wakil presiden tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Hasil pemilihan presiden Juli 2014 mengantarkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yang ditetapkan dengan keputusan KPU No. 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 dimana Jokowi-JK memperoleh

53,15 persen suara,¹⁸ dan Prabowo-Hatta hanya mendapat 46,85 persen suara. Kemenangan PDIP di DPR plus kemenangan pasangan Jokowi-JK yang berasal dari PDIP dan didukung 3 partai lain, membuat Koalisi Merah Putih harus berpikir taktis supaya mereka masih dapat menguasai dan mengontrol tata kelola pemerintahan di daerah-daerah.

Dalam rangka mengamankan kekuasaan di daerah-daerah, cara yang paling strategis yang dapat dilakukan Koalisi Merah Putih adalah dengan mengusulkan Pilkada melalui DPRD karena mereka dapat melakukan manuver politik yang lebih leluasa di dalam DPRD untuk mendudukkan orang-orangnya dalam jabatan tertinggi di daerah. Maka, jika per 4 Juni 2013, jauh hari sebelum Pileg dan Pilpres 2014, F-Partai Golkar, F-PDIP, F-PKS, F-PAN, F-GERINDRA, F-HANURA mendukung Pilgub/Pilbub/Pilwakot Langsung seperti disajikan dalam Tabel 1. di atas. Dalam perkembangannya menjelang sidang paripurna DPR 25 September 2014, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih seperti GERINDRA, mengusulkan Pilkada melalui DPRD. Sementara itu kubu partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla yaitu PDIP, PKB, HANURA, dan Demokrat (meskipun kemudian Demokrat melakukan *walk-out*¹⁹) mengusulkan Pilkada langsung. Setelah melalui pemungutan suara dalam sidang paripurna, 361 suara menghendaki Pilkada melalui DPRD dan 226 suara menghendaki Pilkada langsung. Dengan demikian DPR mengesahkan mekanisme Pilkada melalui DPRD yang diadopsi dalam UU Pemerintahan Daerah yang Baru No.23/2014.

Terlepas dari manuver antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (kubu Jokowi-JK) dari berbagai diskusi yang berkembang diantara para politisi tersebut, opsi mengenai Pilkada melalui DPRD maupun langsung lebih didasari kalkulasi politik yang menguntungkan kelompoknya. Tampaknya aspek keadilan gender yang mempertimbangkan supaya perempuan memiliki akses, partisipasi, dan kontrol yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah dalam kepemimpinan politik di daerah, belum menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, disahkannya mekanisme Pilkada melalui DPRD dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru No.23/2014 menandakan kemunduran signifikan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, tidak saja dari kacamata demokrasi terlebih lagi dari perspektif peluang partisipasi

perempuan untuk berkiprah dan menjadi pemimpin-pemimpin politik tertinggi di daerah. 'Struktur kesempatan' yang semula sudah terbuka lebar dalam mekanisme Pilkada langsung, menjadi tertutup kembali dengan disahkannya mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Padahal menurut penelitian penulis, Pilkada langsung sejak 2005 tersebut tidak hanya mampu meningkatkan kuantitas perempuan kepala daerah terpilih, tetapi juga telah membuka cakrawala pandang baru mengenai peran positif agama (khususnya Islam karena sebagian besar perempuan yang terpilih sebagai pemimpin daerah adalah Muslim), gender, dan jaringan di balik kemunculan para perempuan pemimpin politik di daerah pasca-Suharto.²⁰ Lebih jauh, penelitian saya menyimpulkan bahwa kemunculan para perempuan pemimpin daerah yang difasilitasi oleh mekanisme Pilkada langsung telah memperluas ekspektasi mengenai kemungkinan peran dan posisi yang dapat dilakukan perempuan Indonesia untuk menentukan arah demokratisasi.²¹ Para aktifis perempuan juga mendukung Pilkada langsung. Maka tidak mengherankan jika beberapa hari sebelum sidang paripurna DPR, berbagai kelompok perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia melakukan aksi menolak Pilkada melalui DPRD di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 22 September 2014. Menurut Koalisi Perempuan, Pilkada melalui DPRD membuat kaum perempuan tidak dapat memilih secara langsung calon kepala daerah yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan perempuan; oleh karenanya mereka memilih mendukung Pilkada secara langsung.²² Maka, dengan disahkannya mekanisme Pilkada melalui DPRD, hal ini akan berdampak negatif bagi partisipasi dan peluang kepemimpinan perempuan di tingkat lokal. Tanpa menafikan perkembangan tersebut, bagian berikutnya dalam tulisan ini akan memaparkan profil para perempuan pemimpin daerah yang terpilih baik pada waktu pemilihan melalui DPRD dibawah UU No.22/1999, dan ketika Pilkada langsung berlaku di bawah UU No. 32/2004 dimana jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah mengalami peningkatan signifikan.

Profil Perempuan Pemimpin Daerah

Paparan mengenai profil perempuan daerah ini akan diawali dengan penyajian dan elaborasi data yang berisi beberapa perempuan pemimpin daerah

yang terpilih dalam mekanisme Pilkada melalui DPRD yang diatur dengan UU No.22/1999. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2 dibawah ini.

Melalui Tabel 2. di atas, dapat dilihat bahwa para perempuan terpilih sebagai pemimpin daerah melalui pemilihan di dalam DPRD selama berlakunya UU No.22/1999 relatif sedikit yaitu hanya 4 orang. Itupun adalah para politisi perempuan 'warisan' zaman Orde Baru yang sudah terlebih dahulu memiliki pengalaman politik berkiprah di partai politik yang pada zaman Orde Baru diperbolehkan eksis (Golkar, PDI, dan PPP). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD pada era awal tahun 2000-an, memang memberikan dampak positif bagi munculnya para perempuan pemimpin daerah tetapi tidak sepenuhnya memfasilitasi munculnya figur-figur perempuan baru lainnya dengan modal individu yang beragam. Perubahan semakin positif terjadi sejak berlakunya mekanisme Pilkada langsung yang diatur dengan UU No. 32/2004 dan efektif berlaku sejak tahun 2005, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

Sumber: dibuat dan disusun secara sistematis oleh penulis dari berbagai sumber.

Melalui Tabel 3 di atas terlihat bahwa ada 18 perempuan terpilih menjadi pemimpin daerah di Jawa yang sebagian besar pada posisi bupati/walikota, dan ada 8 perempuan terpilih sebagai pemimpin daerah di Luar Jawa yang sebagian besar juga menduduki jabatan bupati/walikota. Secara keseluruhan ada 26 perempuan terpilih sebagai pemimpin daerah melalui Pilkada langsung di Jawa dan Luar Jawa selama kurun waktu 2005-2014 di bawah UU No.32/2004. Jumlah ini meningkat drastis dari hanya 4 perempuan terpilih sebagai pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan di DPRD selama kurun waktu 2000-2005. Jadi, dari segi kuantitas dan perspektif keadilan gender, jelas pemilihan Pilkada langsung memberikan peluang lebih tinggi bagi perempuan untuk berkiprah dan terpilih sebagai pemimpin daerah; dan dengan sendirinya mekanisme ini lebih mendorong ke arah terpenuhinya kesetaraan gender di bidang politik. Selain itu, detail profil para perempuan pemimpin daerah tersebut memperlihatkan bahwa sebagian

besar dari mereka adalah Muslim, dan sebagian kecil adalah Kristen protestan di Luar Jawa, memiliki latar belakang sosial yang beragam (nasionalis, birokrat, santri), dengan rata-rata pendidikan terbanyak adalah strata-1. Jadi, dapat dikatakan bahwa modal individu yang dimiliki para perempuan pemimpin daerah ini cukup baik dan lebih beragam dibandingkan perempuan yang terpilih pada waktu pemilihan melalui DPRD semasa UU No.22/1999. Dari 26 profil perempuan pemimpin daerah tersebut, dari segi asal muasalnya penulis mengelompokannya menjadi empat tipe: *pertama* adalah tipe perempuan politisi/birokrat karier dengan pengaruh kekerabatan yang kuat; *kedua* adalah tipe perempuan kepala daerah yang menduduki jabatan karena kekerabatan yang sangat kuat; *ketiga* adalah perempuan non politisi/non birokrat karier dengan pengaruh kekerabatan yang kuat; *keempat* adalah perempuan politisi/birokrat karier tanpa pengaruh kekerabatan yang kuat.

kemudian memfasilitasi perkembangan karier politik yang bersangkutan. Perempuan birokrat karier adalah perempuan yang mengawali kiprah politiknya melalui profesionalisme kerja di jajaran birokrasi sesuai dengan profesinya, yang pada taraf tertentu kemudian mengantarkan yang bersangkutan untuk aktif terlibat pada partai politik tertentu yang memfasilitasi perkembangan karier politiknya. Sementara itu, 'hubungan kekerabatan' dalam tulisan ini, penulis mengacu pada istilah "*familial ties*" yang diungkapkan oleh Linda K. Richter (1990-1991). Richter menganalisis kemunculan politik para pemimpin perempuan di Asian Selatan dan Asia Tenggara (Benazir Bhutto, Indira Gandhi, Sirimavo Bandaranaike, Corazon Aquino, Aung San Suu Kyi, dan Sheik Hasina Wajed) dan menengarai salah satu faktor yang sangat berperan di balik kemunculan politik mereka adalah "*familial ties*" yaitu pengaruh dari kerabat laki-laki (ayah, ayah mertua, kakak, adik) yang merupakan seorang politisi berpengaruh

Tabel 2. Profil Perempuan Pemimpin Daerah yang Terpilih melalui DPRD pada masa berlakunya UU No. 22/1999

No	Nama	Posisi	Parpol Pengusung	Data Pribadi	Kelas Sosial/ Afiliasi politik	Riwayat Politik
1	Rustriningsih	Bupati Kebumen (2000-2005)	PDIP	- Pendidikan ketika mencalonkan pertama kali: S1 - Muslim - Ayahnya adalah Tokoh PDI di Kebumen pada Orde Baru - Sejak muda merintis bisnis i agen koran yang kemudian berkembang besar di Gombang	- Menengah - Nasionalis	- Wakil sekretaris PDI Kebumen sejak 1993 - 1996 terpilih sebagai ketua <i>Dewan Pimpinan Cabang</i> PDI (Pro Megawati) Kebumen - Ketua KPU Kebumen 1999 - Terpilih sebagai anggota MPR dari PDIP Pemilu 1999 - Kandidat bupati Kebumen pada Pilkada 2000 (pemilihan melalui DPRD), dan terpilih sebagai Bupati Kebumen
2	Haeny Relawati Rini Widyastuti	Bupati Tuban (2001-2006)	Golkar	- Pendidikan ketika mencalonkan: S2 - Muslim - Suka berorganisasi - Ayahnya mantan birokrat berpengaruh di Kabupaten Tuban - Suaminya seorang pengusaha besar di Tuban	- Menengah - Keluarga birokrat	- Ketua Himpunan Wanita Karya Tuban - Wakil Ketua DPD II Golkar Tuban 1992 - Ketua DPD II Golkar Tuban 1999 - Ketua DPRD Tuban (1999-2000)
3	Rina Iriani Sri Ratnaningsih	Bupati Karanganyar (2003-2008)	PDIP	- Pendidikan: S2 - Muslim - Guru SD di Karanganyar 1982 - Suaminya adalah seorang pengusaha - Ia perlahan menjadi pengusaha perempuan di bidang properti	- Menengah	- Mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar periode (2003-2008) dan terpilih sebagai Bupati Karanganyar

Perempuan politisi dalam tulisan ini didefinisikan sebagai perempuan yang mengawali karier politik secara profesional melalui partai politik tertentu yang

dan kuat, yang memfasilitasi seorang politisi perempuan membangun dan mencapai peran kepemimpinan politik tertentu.²³ Penulis

4	Tutty Hayati Anwar	Bupati Majalengka (2003-2008)	Golkar	- Pendidikan: S2 - Muslim - Adik dari Yogi S. Memet Gubernur Jawa Barat (1985-1993), dan Menteri Dalam Negeri RI (1993-1998)	- Menengah atas - Birokrat	- Telah menjadi Bupati Majalengka periode (1998-2003) ketika UU No.5/1974 masih berlaku. - Mencalonkan kembali sebagai Bupati Majalengka tahun 2003 ketika UU No. 22/1999 berlaku dan terpilih sebagai Bupati Majalengka (2003-2008)
---	--------------------	-------------------------------	--------	--	-------------------------------	---

Sumber: dibuat oleh penulis dari berbagai sumber.

menerjemahkan “*familial ties*” dengan kata ‘hubungan kekerabatan’ dengan pengertian yang sama dengan frasa “*familial ties*”. Dalam pemahaman penulis, jika “*familial ties*” terus berlanjut ke beberapa generasi, sehingga terjadi akumulasi dan dominasi sumber daya sosial, ekonomi, politik di suatu daerah tertentu, “*familial ties*” akan menjadi sebuah dinasti politik.

Tipe *pertama*, adalah tipe perempuan politisi/ birokrat karier dengan pengaruh kekerabatan yang kuat. Masuk dalam kategori ini adalah (i)

Rustriningsih karena dia mengawali karier politik di PDIP sejak masa muda, dimana ayahnya merupakan politisi senior PDI (pro Megawati) pada masa Orde Baru, sebagai mentor utamanya dan mempermudah karier politiknya; (ii) Haeny Relawati Rini Widyastuti dengan pengaruh ayahnya seorang birokrat dan politisi Golkar di Tuban, mengawali karier sebagai politisi di Golkar Kabupaten Tuban, kemudian terpilih sebagai ketua DPRD Kabupaten Tuban, dan meningkat menjadi calon bupati dan terpilih menjadi bupati Tuban pada tahun 2006; (iii) Ratu Atut

Tabel 3. Profil Perempuan Pemimpin Daerah yang Terpilih melalui Pilkada Langsung pada masa berlakunya UU No. 32/2004 (2005-2014)

No	Nama	Posisi	Parpol Pengusung	Data Pribadi	Kelas Sosial/ Afiliasi politik	Karier Sosial-Politik
DI JAWA						
1	Rustriningsih	Bupati Kebumen (2005-2010)	PDIP	- Pendidikan ketika mencalonkan pertama kali: S1 - Muslim - Ayahnya adalah tokoh PDI di Kebumen pada masa Orde Baru - Sejak muda merintis bisnis sebagai agen koran yang kemudian berkembang besar di Gombang	- Menengah - Nasionalis	- Sda - Bupati Kebumen (2000-2005) - Mencalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada langsung di Kebumen tahun 2005 dan terpilih menjadi bupati perempuan pertama di Kebumen dan bupati perempuan pertama di Indonesia yang terpilih melalui Pilkada langsung
2	Haeny Relawati Rini Widyastuti	Bupati Tuban (2006-2011)	Golkar	- Pendidikan: S2 - Muslim - Ayahnya mantan birokrat berpengaruh di Kabupaten Tuban - Suaminya seorang pengusaha besar di Tuban	- Menengah - Keluarga birokrat	- Ketua Himpunan Wanita Karya Tuban - Wakil Ketua DPD II Golkar Tuban 1992 - Ketua DPD II Golkar Tuban 1999 - Ketua DPRD Tuban 1999-2000 - Bupati Tuban (2001-2006)
3	Rina Iriani Sri Ratnaningsih	Bupati Karanganyar (2008-2013)	PDIP	- Pendidikan: S2 - Muslim - Guru SD di Karanganyar tahun 1982 - Suaminya adalah pengusaha perlahan menjadi perempuan pengusaha sukses bidang properti	- Menengah	- Bupati Karanganyar (2003-2008) - Mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar dalam Pilkada langsung 2008 dan terpilih menjadi Bupati Karanganyar (2008-2013)
4	Siti Qomariyah	Bupati Pekalongan (2006-2011)	PKB	- Pendidikan: S2 - Muslim - Dosen di Perguruan Tinggi Islam in Pekalongan - Ayahnya seorang tokoh kyai NU memiliki pesantren kecil di Wonoyoso, Buaran, Pekalongan	- Menengah - Santri	- Aktif di kalangan Muslimat NU Pekalongan dan terkenal sebagai figur perempuan NU yang cerdas, modern - Mulai dilirik PKB Pekalongan sejak Pilkada tahun 2001 - Pada Pilkada 2001, ia dicalonkan sebagai wakil Bupati Pekalongan oleh PKB Pekalongan berpasangan dengan calon bupati dari PDIP - Lalu Siti terpilih menjadi wakil Bupati Pekalongan (2001-2005) semasa Pilkada melalui DPRD di bawah UU No.22/1999 - Lalu, Siti dicalonkan PKB sebagai bupati dalam Pilkada langsung 2006 dan terpilih sebagai bupati

5	Ratna Ani Lestari	Bupati Banyuwangi (2005-2010)	Gabungan partai politik non-parlemen (18 parpol)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: S2 - Muslim - Keluarga adalah pengusaha di Banyuwangi - Suaminya adalah Bupati Jembrana yang waktu itu petinggi PDIP di Jembrana 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah - Nasionalis 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD Jembrana dari PDIP (2004-2009) - Mencalonkan diri dalam Pilkada Langsung di Banyuwangi tahun 2005 dan terpilih
6	Ratu Atut Chosiyah	- Gubernur Banten (2006-2011) (2011-2016)	Golkar, PDIP, PBB, PBR, PDS, PPI	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: S1 - Muslim - Ayahnya Chasan Sochib seorang jawara berpengaruh di Banten menguasai dinasti politik Banten - Suaminya pengusaha dan politisi Golkar terkenal di Banten 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah atas - Birokrat 	<ul style="list-style-type: none"> - politisi partai Golkar di Banten - Menjadi Wakil gubernur Banten (2001-2006) - Maju dalam Pilkada langsung di Banten pada tahun 2006 dan terpilih sebagai Gubernur Banten selama dua periode.
7	Haryanti Sutrisno	Bupati Kediri (2010-2015)	PDIP, PPP, PKNU, Golkar, Hanura	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: S1 - Muslim - Istri pertama dari Sutrisno, Bupati Kediri (2000-2005) (2005-2010) - Dokter - Pengusaha sukses 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah atas - Nasionalis 	<ul style="list-style-type: none"> - Profesinya sebagai dokter membuatnya mudah berinteraksi dan disukai masyarakat - Banyak aktif di organisasi kewanitaan - Pada Pilkada Langsung tahun 2010 Haryanti bertarung dengan istri muda Sutrisno Hj. Nurlaila dan akhirnya menang menjadi Bupati Kediri
8	Sri Surya Widati	Bupati Bantul (2010-2015)	PDIP	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: SMA - Muslim - Istri Idham Samawi Bupati Bantul (2000-2005) (2005-2010) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah - Birokrat 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif di organisasi kewanitaan selama menjadi istri Bupati Bantul - Setelah suaminya menjabat 2 kali, maka dirinya mencalonkan dan terpilih sebagai Bupati Bantul dalam Pilkada langsung tahun 2010
9	Widya Kandi Susanti	Bupati Kendal (2010-2015)	PDIP	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: S2 - Muslim - Awalnya berprofesi sebagai dokter - Suaminya, Hendy Boedoro adalah ketua DPC PDIP Kab. Kendal - Suaminya lalu terpilih menjadi Bupati Kendal (2000-2005) (2005-2010) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah atas - Politisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua PAC PDIP Kec. Kota Kendal (2001-2006) - Ketua DPC PDIP Kendal (2008-2010) - Ketua DPC PDIP Kab. Kendal (2010-2015) - Anggota DPRD Kab. Kendal (2004-2009) - Wakil ketua DPRD Kab. Kendal (2009-2014)
10	Anna Sophanah	Bupati Indramayu (2010-2015)	Golkar	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: SMA - Muslim - Istri Irianto M.S. Syafiuddin, Bupati Indramayu (2000-2005)(2005-2010) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif di gerakan PKK sewaktu menjadi istri Bupati Indramayu sehingga mudah berinteraksi terutama dengan ibu-ibu - Anggota DPRD Indramayu dari Golkar (2009-2014)
						<ul style="list-style-type: none"> - Mencalonkan diri sebagai bupati dalam Pilkada langsung 2010 dan terpilih
11	Airin Rachmy Diany	Walikota Tangerang Selatan (2011-2016)	Golkar	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: S2 - Muslim - Menikah dengan Tubagus Chaeri Wardana seorang pengusaha dan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, sehingga dengan sendirinya Airin masuk dalam keluarga dinasti politik Banten 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah atas 	<ul style="list-style-type: none"> - Awalnya seorang notaris di Tangerang - Aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan perempuan di Tangerang - Mencalonkan dan terpilih menjadi Walikota Tangerang Selatan dalam Pilkada Langsung 2011
12	Tri Rismaharini	Walikota Surabaya (2010-2015)	PDIP	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: S2 - Muslim - Birokrat sukses di Surabaya memulai karier sebagai kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sejak 1997 - Suaminya seorang pegawai perusahaan swasta - Ayah Risma seorang veteran perang, pegawai pajak dan pengusaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah atas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya (2002) - Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2003-2005) - Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2010) - Latar belakang pendidikan di bidang arsitektur dan S2 di bidang manajemen pembangunan kota mendorong program inovatif membenahi Kota Surabaya - Terpilih sebagai Walikota Surabaya (2010-2015) dalam Pilkada langsung 2010
13	Idza Priyanti	Bupati Brebes (2012-2017)	PDIP, PKS, Democrat, Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan: S2 - Muslim - Ayahnya seorang pengusaha sukses di bidang transportasi dan diteruskan oleh Idza Priyanti - Kakanya adalah Walikota Tegal (2009-2013) - Suami adalah polisi pangkat menengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menengah atas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha sukses di bidang transportasi yang memperbesar modal sosial- finansial untuk berpolitik - Terpilih sebagai Wakil Bupati Brebes sisa masa jabatan periode (2007 –2012) melalui rapat Paripurna DPRD Brebes, karena sang Bupati Indra Kusuma menjadi tersangka korupsi.

14	Puput Tantriana Sari	Bupati Probolinggo (2013-2018)	PDIP, PKB, PKIB, PKNU, Gerindra, Hanura	- Pendidikan: S1 - Muslim - Istri Hasan Aminuddin Bupati Probolinggo (2002-2007)(2007-2012)	- Menengah	- Ketua Dewan Penasehat Muslimat NU Probolinggo
15	Rukmini	Walikota Probolinggo (2014-2019)	PDIP, PKS, PAN, P. Pelopor	- Pendidikan: S1 - Muslim - Istri HM Buchori Walikota Probolinggo (2004-2009) (2009-2014)	- Menengah atas	- Aktif di Fatayat NU Probolinggo - Anggota DPR RI dari PDIP (2009-2014) - Mencalonkan dan terpilih sebagai Walikota Probolinggo dalam Pilkada langsung 2014
16	Utje Ch Hamid Suganda	Bupati Kuningan (2013-2018)	PDIP	- Pendidikan: S2 - Muslim - Istri Aang Hamid Suganda Bupati Kuningan (2003-2008) (2008-2013)	- Menengah atas	- Selama menjadi istri Bupati aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan menjalankan berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan anak dan masyarakat sehingga dikenal dekat oleh masyarakat - Memperoleh banyak penghargaan
17	Hj Atty Suharti Tochija	Walikota Cimahi (2012-2017)	Golkar, PPP	- Pendidikan: S1 - Muslim - Istri Itoch Tochija, Walikota Cimahi (2002-2007)(2007-2012)	- Menengah atas	- Semasa menjadi siteri walikota, ia aktif menggerakkan berbagai program sosial di bidang kesehatan dan anak-anak sehingga dikenal luas oleh masyarakat
18	Neneng Hasanah Yasin	Bupati Bekasi (2012-2017)	Golkar, Demokrat, PAN	- Pendidikan: S1 - Muslim - Anak dari pengusaha beras sukses Hasanah Yasin di Bekasi	- Menengah atas	- Pengaruh sosial dari ayahnya mempermudah Neneng untuk maju dalam politik - Politisi Golkar - Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi
DI LUAR JAWA						
1	Vonny Anneke Panambunan	Bupati Minahasa Utara (2005-2010)	PP, PKPI, PPD	- Pendidikan: SMA - Kristen - Berasal dari keluarga biasa - Suaminya berasal dari keluarga kaya, namun kemudian bercerai dan menjadi orangtua tunggal - Menjadi pengusaha kaya dengan berbagai bisnis di Jakarta, Kalimantan dan luar negeri	- Menengah	
2	Hj. Marlina Moha Siahaan	Bupati Bolaang Mongondow (2006-2011)	Golkar	Pendidikan: S1 - Muslim - Ayahnya seorang tokoh polisi - Suaminya H.Syamsudin Kudji Moha pengusaha dan politisi partai Golkar dan ketua DPRD dari Golkar di Bolaang Mongondow Selatan.	- Menengah	- Politisi Partai Golkar - Karier politik suaminya mempermudah Marlina untuk maju dalam berbagai jabatan politik di Bolaang Mongondow
3	Hj. Suryatati A. Manan	Walikota Tanjung Pinang (2008-2013)	PDIP, Golkar	- Pendidikan: S1 - Muslim - Birokrat karier dengan pendidikan di <i>Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta</i>	- Menengah	- Camat Tanjungpinang Barat (1993-1995) - Kepala Dispenda Kepulauan Riau (1995-1996) - Wali kota Kota Administratif Tanjungpinang (1996-2001) - Pejabat walikota Tanjungpinang (2001-2003) - Mencalonkan dan terpilih sebagai walikota Tanjung Pinang pada Pilkada Langsung 2008
4	Telly Tjanggalung	Bupati Minahasa Tenggara (2008-2013)	Golkar	- Pendidikan: SMA - Kristen - Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Golkar - Suaminya adalah Bupati Talaud dua periode tetapi kemudian terjerat kasus korupsi	- Menengah atas	
5	Ni Putu Eka Wiryastuti	Bupati Tabanan (2010-2015)	PDIP	- Pendidikan: S1 - Hindu - Ayahnya Nyoman Adi Wiryatama adalah tokoh PDIP dan Bupati Tabanan (2000-2005) (2005-2010)	- Menengah atas	- politisi PDIP di Tabanan - Sebagai putri seorang Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti terbiasa dengan kagitan politik dan ayahnya tentu menjadi figur yang sangat mempengaruhi perkembangan kariernya.

6	Rita Widyasari	Bupati Kutai Kertanegara (2010-2015)	Golkar	- Pendidikan: S2 - Muslim - Ayahnya Syaukani HR adalah Bupati Kutai Kertanegara (1999-2004) (2005-2006)	- Menengah atas - Birokrat	- Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kutai Kertanegara (Kukar) - Ketua DPRD Kab. Kukar (2009-2014) - Bupati Kutai Kertanegara (2010 - 2015)
7	Christiany Eugenia Paruntu	Bupati Minahasa Selatan (2010-2015)	Golkar	- Pendidikan: S1 - Kristen - Ayahnya adalah mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi, Jopie Tarutu dan politisi Golkar Manado - Ibunya seorang politisi Golkar terkenal di Manado - Ia menjadi pengusaha sukses di Minahasa Selatan dan Jakarta	- Menengah atas dengan latar belakang pendidikan yang bagus	- Politisi Golkar Manado - Fungsionaris DPP Partai Golkar yaitu Wakil Bendahara I Partai Golkar Sulawesi Utara - Aktif dalam berbagai kegiatan sosial - Mencalonkan diri dalam Pilkada langsung 2010 dan terpilih sebagai Bupati Minahasa Selatan sejak 2010
8	Juliarti Djuhardi Alwi	Bupati Sambas (2011-2016)	Demokrat, PPP, PAN	- Pendidikan: S2 - Muslim - Dokter Profesional yang menjadi birokrat sukses di Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	- Menengah	- Kepala Puskesmas Sambas pada Desember 1989. - Tahun 2001 menjadi Pelaksana Tugas Direktur RSUD Sambas - Kepala Dinas Kesehatan Sambas - Kariernya sebagai birokrat yang sukses mengantarkannya menjadi Wakil Bupati Sambas (2006-2011) dalam Pilkada langsung tahun 2006 - Mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Sambas pada Pilkada langsung tahun 2011

Chosiyah dengan modal pengaruh ayahnya Chasan Sohib seorang jawara terkenal di Banten. Ratu Atut perlahan namun pasti mengembangkan karier politik di Golkar dan menjadi wakil gubernur Banten pada tahun 2001 yang terus menanjak menjadi Gubernur terpilih pada Pilkada Langsung tahun 2006 dan menang kembali pada 2011; (iv) Idza Priyanti ayahnya seorang pengusaha transportasi sukses yang mempermudah pengaruh politiknya, termasuk kemungkinan pengaruh kakaknya sebagai walikota Tegal (2009-2013) yang mengantarkannya dicalonkan dan terpilih menjadi wakil bupati Brebes sisa masa jabatan periode (2007-2012) dan kemudian terpilih menjadi Bupati Brebes (2012-2017) dalam Pilkada langsung; (v) Neneng Hasanah Yasin adalah anak dari pengusaha sukses di Bekasi yang mempermudah Neneng sebagai politisi Golkar terpilih menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi dan kemudian menang sebagai Bupati Bekasi (2012-2017) dalam Pilkada langsung tahun 2012; (vi) Hj. Marlina Moha Siahaan ayahnya adalah seorang politisi sementara suaminya adalah politisi Golkar berpengaruh di Bolaang Mongondow Selatan, yang mempermudah Malina maju dalam berbagai jabatan politik di Bolaang Mongondow hingga akhirnya terpilih menjadi Bupati Bolaang Mongondow (2006-2011); (vii) Telly Tjanggalung adalah politisi Golkar yang pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara dari Golkar, dimana suaminya adalah Bupati Talaud yang kesemuanya memfasilitasi dirinya mencalonkan dan terpilih sebagai Bupati Minahasa Tenggara (2008-2013); (viii) Rita Widyasari politisi Golkar Kutai

Kertanegara dengan pengaruh ayahnya Syaukani HR sebagai politisi Golkar terkenal dan Bupati Kutai Kertanegara (1999-2004) (2005-2006), sehingga memudahkan langkah Rita menjadi Bupati Kutai Kertanegara (2010 - 2015) dalam Pilkada langsung 2010; (ix) Christiany Eugenia Paruntu memiliki modal individu yang bagus karena ayah dan ibunya adalah seorang politisi Golkar terkenal di Manado sehingga memfasilitasi karier politiknya di Golkar-Manado yang dipadukan dengan kariernya sebagai pengusaha sukses, maka Christiany kemudian terpilih sebagai Bupati Minahasa Selatan (2010-2015) dalam Pilkada langsung tahun 2010.

Tipe *kedua* adalah perempuan kepala daerah yang menduduki jabatan kepala daerah karena kekerabatan yang sangat kuat. Hal ini karena suami/ayah yang bersangkutan telah terlebih dahulu menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode berturut-turut. Sesuai aturan pasal 58 (o) UU No.32/2004, kepala daerah yang sudah menjabat dua kali berturut-turut di suatu daerah, yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah. Nah, untuk mensiasati peraturan ini, para petahana mencalonkan istri/anak perempuan sebagai kepala daerah dalam Pilkada langsung. Beberapa contoh perempuan pemimpin daerah yang terpilih dengan latar belakang seperti ini antara lain Haryanti Sutrisno Bupati Kediri (2010-2015), Sri Surya Widati Bupati Bantul (2010-2015), Widya Kandi Susanti Bupati Kendal (2010-2015), Anna Sophanah Bupati Indramayu (2010-2015), Puput Tantriana Sari Bupati Probolinggo (2013-2018), Rukmini Walikota

Probolinggo (2014-2109), Utje Ch Hamid Suganda Bupati Kuningan (2013-2018), Hj Atty Suharti Tochija Walikota Cimahi (2012-2017), Ni Putu Eka Wiryastuti Bupati Tabanan (2010-2015).

Tipe *ketiga* adalah perempuan non politisi/non birokrat karier dengan pengaruh kekerabatan yang kuat. Termasuk dalam tipe ini adalah (i) Rina Iriani Sri Ratnaningsih awalnya adalah seorang guru SD dan suaminya adalah pengusaha, lalu perlahan dia menjadi pengusaha sukses di Karanganyar dan terpilih menjadi Bupati Karanganyar (2003-2008) dan terpilih kembali sebagai Bupati Karanganyar (2008-2013) dalam Pilkada langsung tahun 2008; (ii) Siti Qomariyah awalnya adalah dosen di Perguruan Tinggi Islam di Pekalongan dengan latar belakang pendidikan modern yang sangat bagus, aktifis Muslimat NU, ayahnya seorang tokoh kyai NU di Buaran Pekalongan, dan perlahan dirinya dilirik PKB Pekalongan untuk kemudian terpilih menjadi wakil Bupati Pekalongan (2001-2005) dan menang dalam Pilkada langsung 2006 dan menjadi bupati Pekalongan (2006-2011); (iii) Ratna Ani Lestari awalnya adalah seorang perempuan biasa dari keluarga pengusaha di Banyuwangi, ia kemudian menjadi ibu rumah tangga biasa setelah menikah dengan Bupati Jembrana yang juga politisi PDIP berpengaruh di Jembrana. Ini memfasilitasi aktivitas politiknya sebagai politisi PDIP dan menjadi anggota DPRD Jembrana dari PDIP (2004-2009), untuk kemudian mendorongnya berkiprah sebagai calon bupati Banyuwangi dalam Pilkada Langsung 2005 dan terpilih menjadi Bupati Banyuwangi (2005-2010); (iv) Airin Rachmy Diany awalnya adalah seorang notaris yang menikah dengan Tubagus Chaeri Wardana seorang pengusaha dan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah anak Jawawa Chasan Shohib, sehingga dengan sendirinya Airin masuk dalam keluarga dinasti politik Banten. Lahan Airin aktif dalam politik, dicalonkan Golkar, terpilih sebagai Walikota Tangerang Selatan (2011-2016) dalam Pilkada Langsung 2011. Melalui tipologi ketiga ini, penulis juga hendak memperlihatkan bahwa 'kekerabatan' dalam praktiknya di Indonesia, tidak bisa dilihat sempit hanya menyangkut pengaruh *politisi* laki-laki yaitu ayah/saudara laki-laki/ipar laki-laki terhadap kemunculan politik perempuan. Tetapi 'kekerabatan' juga dapat bermakna luas karena seorang perempuan dapat memperoleh promosi politik ke jenjang tertinggi karena pengaruh ayah/saudara laki-laki yang memiliki latar belakang dan modal sosial-kultural-religius yang kuat seperti kyai, jawara, dsb, *meskipun bukan politisi yang berpolitik praktis*.

Tipe *keempat* adalah perempuan politisi/birokrat karier tanpa pengaruh kekerabatan yang kuat. Ini adalah tipe ideal karena para perempuan dari kalangan ini mengawali karier politik sebagai politisi profesional atau sebagai birokrat tulen yang bekerja di bidang masing-masing. Latar belakang politik ayah maupun suami mereka tidak begitu berpengaruh dalam perkembangan karier mereka. Perkembangan karier lebih ditentukan oleh prestasi dan kesungguhan mereka selama menjadi politisi ataupun birokrat karier di daerah yang bersangkutan yang membuat mereka memperoleh promosi untuk menduduki jabatan publik termasuk sebagai wakil kepala daerah maupun sebagai kepala daerah. Termasuk dalam tipe ini adalah Tri Rismaharini, Vonny Anneke Panambunan, Hj. Suryatati A. Manan dan Juliarti Djuhardi Alwi. Perempuan pemimpin daerah yang muncul dari tipe ini umumnya memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki kemampuan menonjol di bidang tertentu yang telah diasah bertahun-tahun selama mereka menjadi birokrat karier atau politisi, yang kemudian mempengaruhi cara mereka membangun daerah yang bersangkutan selama menjadi kepala daerah. Setelah mengetahui profil dan tipe-tipe perempuan pemimpin daerah yang muncul dalam Pilkada langsung sejak tahun 2005-2014, maka bagian berikutnya akan mencoba melihat kebijakan/program selama masa kepemimpinannya khususnya terkait permasalahan perempuan di daerah yang bersangkutan.

Kinerja Para Perempuan Pemimpin Daerah

Pembahasan mengenai kinerja perempuan pemimpin daerah tidak akan diarahkan untuk membahas semua perempuan pemimpin daerah. Beberapa perempuan yang ditampilkan dimaksudkan untuk memperkaya dan melihat pola-pola tertentu mengenai kebijakan/program selama perempuan tersebut menjabat kepala daerah. Kinerja para perempuan yang disajikan adalah yang terpilih melalui Pilkada langsung yang efektif berlaku sejak 2005, sehingga rentang jabatan minimal lima tahun atau lebih telah memungkinkan untuk dilakukan evaluasi atas kinerja yang bersangkutan. Sebagai gambaran umum mengenai kinerja pemerintah daerah khususnya berkaitan dengan masalah gender, Kemitraan yang bekerjasama dengan AusAID mengeluarkan Indeks Tata Kelola 33 Provinsi dan Pembangunan Daerah di Indonesia atau *Indonesia Governance Index* (IGI) tahun 2012. Secara detail IGI mengukur seberapa jauh kesetaraan gender antara hak laki-laki dan perempuan diperhatikan di setiap

provinsi dengan indikator gender di beberapa arena yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi.²⁴ IGI mencatat bahwa dari segi institusionalisasi pengarusutamaan gender, sebagian besar daerah telah memiliki badan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak tetapi kinerjanya masih lemah; maka Laporan IGI menekankan urgensi peran para perempuan di posisi-posisi strategis pengambil keputusan.²⁵ IGI sampai pada kesimpulan bahwa jumlah perempuan yang tinggi dalam posisi pelaksana atau pembuat kebijakan tidak serta merta meningkatkan perhatiannya pada masalah gender, maka peningkatan jumlah perempuan dalam politik harus dibarengi dengan kapasitas pengambilan keputusan strategis.²⁶ Ternyata hal yang tidak jauh beda juga ditemui di kabupaten/kota. Studi yang dilakukan pada tahun 2010 terhadap 41 kabupaten/kota memperlihatkan masih lemahnya pertimbangan gender dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di kabupaten/kota.²⁷ Lalu bagaimanakah sebenarnya contoh kebijakan/program menyangkut permasalahan perempuan dan anak selama sebuah daerah dipimpin oleh kepala daerah perempuan? Selengkapnya disajikan di bawah ini.

Meskipun Tabel 4 di atas hanya menyajikan empat perempuan pemimpin daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung, paling tidak dapat diperoleh gambaran mengenai kebijakan selama mereka lakukan selama menjabat dan bagaimana kecenderungan mereka merespons masalah perempuan dan anak. Melalui berbagai dokumen resmi daerah yang diperoleh dapat diketahui bahwa ada daerah yang memang telah memasukkan berbagai isu dan masalah perempuan/anak ke dalam agenda dan fokus pembangunannya selama perempuan pemimpin tersebut memerintah, namun ada juga yang tidak menunjukkan pemihakan berarti. Terkadang terdapat kesenjangan antara dokumen tertulis dengan praktik di lapangan, dimana perempuan pemimpin daerahnya cenderung pasif, tidak pro aktif, dan menggantungkan diri pada inisiatif lembaga-lembaga daerah yang bersangkutan.

Tetapi ada pula daerah yang dipimpin oleh perempuan yang memang memiliki komitmen dan keberpihakan nyata pada masalah perempuan dan anak bahkan sebelum yang bersangkutan menjadi bupati/walikota seperti di Surabaya. Untuk kasus yang sedemikian ini, maka kinerja perempuan yang

bersangkutan setelah terpilih menjadi pemimpin daerah terlihat semakin banyak memberikan perubahan dan pembenahan positif khususnya pada masalah perempuan, anak, lingkungan dan kesehatan. Yang pasti memang, seorang perempuan pemimpin sebenarnya sudah memiliki modal alamiah sebagai seorang perempuan atau ibu untuk dapat lebih cepat memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak-anak pada umumnya, termasuk empati dan kecerdasan untuk menggunakan pendekatan yang lembut tetapi tegas dalam menghadapi berbagai persoalan. Seperti halnya pengakuan Walikota Surabaya Tri Rismaharini bahwa menjadi seorang perempuan menjadi kelebihan tersendiri dalam memimpin “kelebihan saya sebagai wanita, saya bisa merasakan seperti seorang ibu bagi seluruh kota”;²⁸ dengan pendekatan tegas namun keibuan misalnya Risma berhasil merangkul para supporter Bola Surabaya (Bonek) yang terkenal garang dan berhasil menutup lokalisasi Dolly dengan pendekatan humanis.

Beragam temuan tersebut menunjukkan dinamika dan tantangan dalam menghasilkan kebijakan yang pro perempuan dan anak, ketika sebuah pemerintah daerah dipimpin oleh perempuan. Ternyata masalahnya tidak sederhana. Penelitian penulis lebih mendalam terhadap Rustriningsih, Siti Qomariyah, dan Ratna Ani Lestari, memperlihatkan beberapa faktor yang mempengaruhi posisi kebijakan seorang perempuan pemimpin khususnya dalam menangani permasalahan perempuan di tingkat lokal. Diantaranya adalah pengalaman pribadi mereka dalam organisasi dan jaringan perempuan dalam proses politiknya, karakter kepemimpinannya, dan komitmen individu terhadap masalah kesetaraan gender dalam mengatasi permasalahan perempuan di tingkat lokal; sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan perempuan pemimpin politik tidak serta merta menjamin bahwa kebijakan politik yang dihasilkan akan sensitif gender dan berperspektif perempuan.²⁹

Penutup: Agenda Politik ke Depan

Tulisan ini menemukan bahwa wajah perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia tidak sederhana. Kondisi naik atau turunnya kuantitas dan partisipasi perempuan sebagai pemimpin politik di daerah sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik lebih luas yang melingkupinya. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru ketika konteks sosial politik Indonesia otoriter dalam kontrol penuh rezim Suharto, ideologi gender yang dikembangkan

waktu itu tidak mendorong peran perempuan berpolitik termasuk menjadi pemimpin daerah. Pada saat itu, posisi dan peran perempuan Indonesia lebih banyak diarahkan sebagai ibu dan istri yang menopang kiprah suami mengabdikan untuk negara. Pada masa Orde Baru, Pilkada dibawah UU No.5/1974 dilakukan melalui DPRD, dimana hanya tiga partai politik (Golkar, PPP, PDI) yang boleh berkompetisi sehingga mempermudah kontrol pusat (Suharto) untuk memenangkan orang-orangnya sebagai pemimpin daerah. Hasilnya, hanya sedikit perempuan terpilih sebagai pemimpin daerah dan

sensitifitas gender yang kuat memungkinkan terjadinya perubahan secara perlahan orientasi program-program menyangkut perempuan (seperti Dharma Wanita, PKK, KB) ke arah pemberdayaan dan perluasan peran politiknya. Dalam konteks sedemikian, muncul pula UU No. 22/1999 yang mengatur mekanisme Pilkada melalui DPRD tetapi dengan mengurangi campur tangan presiden secara signifikan. Pada saat berlakunya UU No. 22/1999, perlahan mulai muncul empat perempuan pemimpin daerah, meskipun masih didominasi wajah-wajah lama yang berasal dari Golkar atau PDI(P) dan belum

Tabel 4. Perempuan Pemimpin Daerah dan Kebijakan/Program terkait Permasalahan Perempuan dan Anak-Anak

Nama dan Jabatan	Kebijakan/Program	Hasil/Prestasi
<p>Rustriningsih Bupati Kebumen (2005-2010)</p>	<p>- Dalam <i>Rencana Kerja Pemerintah Daerah</i> Kab. Kebumen 2006-2010, upaya kesetaraan gender dimasukkan dalam satu program dengan pemberantasan kesenjangan dan kemiskinan.¹ Tetapi setelah dilihat mendalam, pemerintah daerah lebih fokus memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan pengendalian penduduk, dan tidak menyebutkan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>	<p>- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kebumen masih tinggi dari 67 kasus (2006), menjadi 86 kasus (2007) dan meningkat 93 kasus (2008).⁴</p>
	<p>- Wawancara dengan PR, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kebumen mengatakan Rustriningsih cenderung pasif dan tidak proaktif dalam mengatasi isu-isu perempuan, sehingga para staf di Badan ini yang harus aktif menginisiasi program dan kegiatan.² Hal yang sama dikemukakan IR aktifis INDIPT Kebumen yang mengatakan bahwa memiliki bupati perempuan tidak serta merta berarti pemerintahannya lebih sensitive gender.³</p>	
<p>Siti Qomariyah Bupati Pekalongan (2006-2011)</p>	<p>- <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</i> Pekalongan (2006-2011), pemberdayaan perempuan bukan merupakan salah satu dari 8 prioritas pembangunan, meskipun dokumen juga mengakui kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan lemahnya kelembagaan.⁵</p>	<p>- Angka Kematian Ibu justru meningkat di Kab. Pekalongan dari 85/100,000 kelahiran hidup (2005), ke 149 (2006), 176 (2007) dan 173 (2008).⁶</p> <p>- Kesenjangan gender bidang pendidikan dimana angka buta huruf perempuan lebih tinggi daripada laki-laki: laki-laki ada pada 8,75 % (2002), 9,41 % (2003), 8,61 % (2004), dan 6,53 % (2007), perempuan lebih tinggi yaitu 17,70 % (2002), 17,69 % (2003), 16,07 % (2004) dan 16,48 % (2007).⁷</p> <p>- Tingginya masalah menyangkut kekerasan terhadap pekerja perempuan (TKW) yang belum ditangani serius oleh lembaga terkait mengingat Kab. Pekalongan adalah salah satu daerah kantong pengiriman TKW dan buruh migran ke luar negeri dari Jawa Tengah.</p>

sebagian besar dari Golkar. Perubahan positif kondisi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah mulai terasa sejak 1998 ketika konteks politik berubah ke arah demokratisasi pasca kejatuhan Suharto. Munculnya figur Presiden baru yang memiliki

memberikan peluang munculnya pesaing-pesaing baru.

Perubahan yang lebih signifikan terasa setelah berlakunya UU No.32/2004 yang memperkenalkan mekanisme Pilkada langsung. Dalam konteks

<p>Ratna Ani Lestari Bupati Banyuwangi (2005-2010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</i> Banyuwangi (2006-2010), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak adalah salah satu dari 11 fokus pembangunan; pemerintah daerah ingin fokus mengatasi 4 masalah utama yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyediaan data tentang kesenjangan gender, peningkatan peran perempuan dalam politik, dan kesehatan.⁸ Tetapi tampaknya dokumen bagus ini belum diimbangi dengan implementasi sehingga banyak permasalahan muncul. - Angka Kematian Ibu meningkat dari 6/1000 kelahiran hidup (2005), menjadi 20/1000 kelahiran hidup (2006).⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak masalah mengenai HIV/AIDS karena Banyuwangi memiliki banyak lokalisasi dan semasa Ratna Ani Lestari tidak ditutup/ditangani maksimal. - Banyak masalah terkait perempuan yang menjadi TKW atau buruh migran di luar negeri karena Banyuwangi adalah salah satu daerah kantong TKW dan buruh migran dari Jawa Timur.
<p>Tri Rismaharini Walikota Surabaya (2010-2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pro perempuan dan anak seperti bus kota perempuan, penyediaan <i>smoking area</i>, ruang menyusui di tempat publik dan taman kota, kecamatan Ramah Anak Award, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS.¹⁰ - Membangun taman yang asri, nyaman, berteknologi tinggi dan terintegrasi untuk warga dan anak-anak, serta memperbaiki trotoar jalan.¹¹ - Membangun rumah penampungan Pemda untuk anak-anak terlantar dan berkebutuhan khusus termasuk merenovasi Taman Surya untuk warga berkebutuhan khusus¹² - Program Pahlawan Ekonomi menggerakkan ibu-ibu rumah tangga dari keluarga kurang mampu untuk kreatif berwirausaha sejak 2010¹³ 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu indeks mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi¹⁴ di Kota Surabaya mengalami kenaikan dari 58.28 (2008), menjadi 58.55 (2009) dan terus meningkat menjadi 77.53 (2010).¹⁵ - Kota Surabaya memperoleh Parahita Ekapraya¹⁶ pada tahun 2011, 2013 (Utama). - Kota Surabayan mendapat penghargaan ASEAN Environmentally Sustainable City Award 2011 dan 2012 - Future Goovernment Award tingkat Asia Pasifik tahun 2013 - Mendapat penghargaan Kota Layak Anak 3 kali berturut-turut tahun 2011, 2012, 2013 . - Risma memperoleh penghargaan "Mayor of the Month" (Februari 2014) dari <i>The City Mayor International</i> .

Sumber: dibuat oleh penulis dari berbagai sumber yang lebih detail dituliskan di *footnote*.

partisipasi perempuan, penulis melihat bahwa Pilkada langsung lebih membuka "struktur kesempatan" yang lebih luas kepada para perempuan untuk bekiper dan bermain politik secara pro-aktif untuk menjadi pemimpin di daerah. Hal ini terbukti dengan terpilihnya 26 perempuan pemimpin daerah (Jawa dan Luar Jawa) yang memenangkan Pilkada langsung sebagian besar sebagai bupati/walikota selama 2005-2014. Jika dilihat dari profilnya, terlihat wajah-wajah baru yang mulai muncul dan ikut menentukan politik di daerah, selain beberapa wajah yang sudah bercokol lama. Demikian juga dengan komposisi partai politik pengusungnya juga menunjukkan variasi yang signifikan tidak hanya didominasi Golkar dan PDIP, tetapi juga terlihat kiprah PKB, PPP, PKS dan partai-partai kecil lainnya. Jadi, dari segi partisipasi, kuantitas perempuan yang terpilih sebagai pemimpin daerah, dan keberagaman politik, Pilkada langsung di bawah UU No. 32/2004 lebih 'ramah' dan membuka ruang bagi munculnya para perempuan pemimpin politik baru. Pada kondisi sedemikian, tidak berlebihan jika penulis menyebut politik lokal di Indonesia (kala itu) sebagai 'lokus ktiris yang memungkinkan' perempuan mencapai tangga-tangga kepemimpinan politik yang lebih tinggi.

Lalu bagaimana tren ke depan, setelah

perkembangan terkini disahkannya UUPemerintahan Daerah yang baru No.23/2014? Dengan dipilihnya opsi Pilkada melalui DPRD dalam UU Pemerintah Daerah yang baru, menunjukkan kemunduran signifikan bagi masa depan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di daerah-daerah, dan dalam tata kelola pemerintahan daerah pada umumnya. Meskipun memang tidak ada jaminan bahwa keterpilihan seorang perempuan menjadi pemimpin daerah serta merta diikuti dengan perbaikan kondisi perempuan dan anak-anak setempat, karena terdapat faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi kinerja yang bersangkutan. Tetapi semakin banyak perempuan menjadi pemimpin daerah, berarti akan semakin besar peluang diadopsinya perspektif gender yang sadar terhadap beragam kebutuhan dan permasalahan perempuan dan anak-anak dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini mengingat tantangan dan permasalahan ke depan yang semakin kompleks seperti permasalahan perubahan iklim yang akan melanda daerah-daerah kota besar dan erat kaitannya dengan aspek gender karena perempuan akan lebih banyak merasakan dampak negatif dari fenomena ini. Permasalahan mengenai pengasuhan anak-anak terutama di daerah-daerah berkembang dan kota-kota besar yang harus dipikirkan oleh para

perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk semakin merajalelanya permasalahan kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan bahkan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Hal-hal ini merupakan permasalahan aktual yang mendesak untuk diperjuangkan.

Daftar Pustaka

- Afshar, Haleh. "Introduction: Women and Empowerment—Some Illustrative Studies," dalam *Women and Empowerment: Illustrations from the Third World*, ed. Haleh Afshar. Macmillan Press: Great Britain, 1998.
- AusAID dan Kemitraan. "Temuan-temuan Utama IGI" dalam *Indonesia Governance Index 2012: "Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif"*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, *Data Pilah Gender Statistik dan Analisis Kabupaten Kebumen 2008*. Kebumen: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi 2007*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2008.
- Bagian Sosial Setda Kabupaten Pekalongan, *Statistik dan Analisis Gender Kabupaten Pekalongan Tahun 2007*. Pekalongan: Bagian Sosial Detda Kabupaten Pekalongan, 2008.
- Bappeda Kabupaten Kebumen. *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015*. Kebumen: Bappeda Kabupaten Kebumen, 2010.
- Bidang Pemberdayaan Perempuan, *Profil Gender Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007*. Banyuwangi: Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, 2007.
- Brody, Alyson. "Gender and Governance: Overview Report," *BRIDGE Development – Gender*, April 2009, 2, http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/Governance_OR_final.pdf (diakses 18 Sept 2014)
- Dewi, Kurniawati Hastuti. "The Emergence of Female Politicians in Local Politics in Post-Suharto Indonesia". PhD Dissertation, Kyoto University, Japan, 2012.
- _____, "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.4, No. 1 (2007: 59-68)
- Dinanta, Rinandi. *Ibu Risma Memimpin dengan Hati*. Yogyakarta: Giga Pustaka, 2014.
- Fitri, Ahmad Asrof. *Serpihan Kisah Bu Risma*. Yogyakarta: Penerbit Real Books, 2014.
- "Gender and Governance," *Gender and Development IN BRIEF Bridge Bulletin*, Issue 21, March 2009, tanpa hal.
- Hatley, Barbara. "Nation, "Tradition," and Constructions of the Feminine in Modern Indonesian Literature," dalam *Imagining Indonesia: Cultural Politics & Political Culture*, ed. Jim Schiller dan Barbara Martin-Schiller. Ohio University, USA: the Centre for Interantional Studies, 1997.
- Kementerian Negara Republik Indonesia. "Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Diterbitkan Keputusannya PresidenRepublik Indonesia Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2005, 2006, 2007, dan Tahun 2008".
- Keputusan KPU No. 536/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang "Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014," diperoleh dari http://www.kpu.go.id/koleksigambar/SK_KPU_536_2272014.pdf (diakses 30 September 2014)
- KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1978.
- LIPI. *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, ed. Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Lovenduski, Joni. "Gender Politics: A Breakthrough for Women," *Parliamentary Affairs* 50, no. 4 (1997): 708-09.
- Molyneux, Maxine. "Mobilization Without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua," *Feminist Studies* 11, no. 2 (Summer 1985):232-33.
- Moser, Caroline. "Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Needs," dalam *Gender and International Relations*, ed. Rebecca Grant and Kathleen Newland. Suffolk: Open University Press, 1991.
- Noris, Pippa. "Introduction: Theories of Recruitment," dalam *Passage to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*, ed. Pippa Noris. United Kingdom: Cambridge University Press, 1997.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2006-2010*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2007.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2006*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2005.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Statistik Gender dan Analisis Kabupaten Pekalongan 2004*. Pekalongan: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2005.
- Richter, Linda K. "Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast Asia," *Pacific Affairs* 63, no. 4 (1990-1991): 526.
- Rini, Ira Puspito. *True Spirit Ibu Risma*. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi, 2014.
- Saptari, Ratna. "Women, Family and Household: Tensions in Culture and Practice," in *Women and Households in Indonesia: Cultural Notions and Social Practices*, ed. Juliette Koning, Marleen Nolten, Janet Rodenburg, Ratna Saptari. Great Britain: Curzon Press, 2000.
- Sullivan, Norma. "Gender and Politics in Indonesia," dalam *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, ed. Maila Stivens. Australia: Centre of Southeast Asian Studies Monash University Aristoc Press, 1991..
- Susanti, Ratna. *Risma Sang Pengetuk Nurani*. Klaten: PT Hamafira, 2014.
- Thompson, Mark. R. "Female Leadership of Democratic Transition in Asia," *Pacific Affairs* 75, no. 4 (2002-2003): 535.
- Tim Pemilu LIPI (Syamsuddin Haris, Sri Nuryanti, Lili Romli, Edison Muchlis, Tri Rainny Syafarani). *Analisa Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Indonesia*, ed. Sri Nuryanti. Jakarta: LIPI Press, 2006.
- Tiwon, Sylvia. "Reconstructing Boundaries and Beyond," in *Women and Households in Indonesia: Cultural, Notions and*

Social Practices, ed. Juliette Koning, Marleen Nolten, Janet Rodenburg, Ratna Saptari. Great Britain: Curzon Press, 2000.

Koran/Sumber On Line

Fazli, Achmad Zulfikar. "Ini Daftar Perolehan Kursi DPR RI Tiap Parpol," *Metro TV News*, 14 Mei 2014, <http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/14/241830/ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol> (diakses 29 September 2014)

"Fraksi Demokrat Walk out," *Kompas*, 26 September 2014, hal. 1.

"Gender and Governance," *Gender and Development IN BRIEF Bridge Bulletin*, Issue 21, March 2009, tanpa hal.

<http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php> (diakses 9 Juli 2012).

<http://www.menegpp.go.id/V2/index.../policy-brief-versi-indonesia, hal.3> (diakses 13 Juli 2012)

"Koalisi Perempuan Tolak Pilkada Lewat DPRD," *Detiknews*, Senin, 22 September 2014, <http://news.detik.com/readfoto/2014/09/22/193227/2697844/157/3/koalisi-perempuan-tolak-pilkada-lewat-dprd> (diakses 3 Oktober 2014)

"MK Kabulkan Gugatan Soal Keterwakilan Perempuan," *Tempo*, Senin, 29 September 2014, <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/29/078610648/MK-Kabulkan-Gugatan-Soal-Keterwakilan-Perempuan> (diakses 9 Oktober 2014)

"Pemerintah Siapkan 8 Instrumen untuk RUU Pemilu," *Tempo*, Senin, 28 Januari 2013, <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/28/1/126637/-Pemerintah-Siapkan-8-Instrumen-untuk-RUU-Pemilu-Kada> (diakses 26 Feb 2013).

"Rusuh Palopo, Mendagri Percepat Pembahasan RUU Pilkada," *Nasional*, 1 April 2013, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/401685-rusuh-palopo-mendagri-percepat-pembahasan-ruu-pilkada> (diakses 3 April 2013)

"Surabaya Kembali Raih Penghargaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak," Rabu, 18 Desember 2013, <http://surabaya.tribunnews.com/2013/12/18/surabaya-kembali-raih-penghargaan-pemberdayaan-perempuan-dan-anak> (diakses 8 Oktober 2014)

"Tabel Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2010," [menegpp.go.id/V2/index.php/.../indikator-gender/idg/.../jawa-timur?](http://www.menegpp.go.id/V2/index.php/.../indikator-gender/idg/.../jawa-timur?) (diakses 13 Juli 2012).

(Footnotes)

- 1 Pemerintah Kabupaten Kebumen, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2006 (*Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2005*), 73.
- 2 Wawancara dengan PR, di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kebumen, 10 Februari 2010.
- 3 Wawancara dengan IR, aktifis INDIPT Kebumen, 27 Juli 2010.
- 4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Data Pilah Gender Statistik dan Analisis Kabupaten Kebumen 2008 (*Kebumen: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2009*), 46.
- 5 Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006-2011 (*Pekalongan: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2006*), 85-6.
- 6 Pemerintah Kabupaten Pekalongan, "Outline Penulisan

Statistik dan Analisis Gender, Anak dan Perempuan Tahun 2009", 28.

- 7 Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Statistik Gender dan Analisis Kabupaten Pekalongan 2004 (*Pekalongan: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2005*), 19; Bagian Sosial Setda Kabupaten Pekalongan, Statistik dan Analisis Gender Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 (*Pekalongan: Bagian Sosial Setda Kabupaten Pekalongan, 2008*), 22.
- 8 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2006-2010 (*Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2007*), 89.
- 9 Bidang Pemberdayaan Perempuan, Profil Gender Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 (*Banyuwangi: Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, 2007*), 81.
- 10 "Surabaya Kembali Raih Penghargaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak," Rabu, 18 Desember 2013, <http://surabaya.tribunnews.com/2013/12/18/surabaya-kembali-raih-penghargaan-pemberdayaan-perempuan-dan-anak> (diakses 8 Oktober 2014)
- 11 Rinandi Dinanta, Ibu Risma Memimpin dengan Hati (*Yogyakarta: Giga Pustaka, 2014*), 24.
- 12 Ratna Susanti, Risma Sang Pengetuk Nurani (*Klaten: PT Hamafira, 2014*), 124, 141.
- 13 Ahmad Asrof Fitri, Serpihan Kisah Bu Risma (*Yogyakarta: Penerbit Real Books, 2014*), 132-134.
- 14 Lihat di <http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php> (diakses 9 Juli 2012).
- 15 "Tabel Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2010," [menegpp.go.id/V2/index.php/.../indikator-gender/idg/.../jawa-timur?](http://www.menegpp.go.id/V2/index.php/.../indikator-gender/idg/.../jawa-timur?) (diakses 13 Juli 2012).
- 16 Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengarusutamaan gender di tingkat lokal seperti sejak tahun 2004 memberikan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kotamadya yang telah menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan.

Catatan Belakang

- 1 "Gender and Governance," *Gender and Development IN BRIEF Bridge Bulletin*, Issue 21, March 2009, tanpa hal.
- 2 Alyson Brody, "Gender and Governance: Overview Report," *BRIDGE Development – Gender*, April 2009, 2; http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/Governance_OR_final.pdf (diakses 18 Sept 2014)
- 3 Joni Lovenduski, "Gender Politics: A Breakthrough for Women," *Parliamentary Affairs* 50, no. 4 (1997): 708-09.
- 4 Haleh Afshar, "Introduction: Women and Empowerment-Some Illustrative Studies," dalam *Women and Empowerment: Illustrations from the Third World*, ed. Haleh Afshar (Macmillan Press: Great Britain, 1998).
- 5 Barbara Hatley, "Nation, "Tradition," and Constructions of the Feminine in Modern Indonesian Literature," dalam *Imagining Indonesia: Cultural Politics & Political Culture*, ed. Jim Schiller dan Barbara Martin-Schiller, 98 (Ohio University, USA: the Centre for Interantional Studies, 1997).

6. Latar belakang Suharto dan istrinya Ibu Tien yang berasal dari Jawa, menurut beberapa ilmuwan mempengaruhi terbentuknya ideologi gender Orde Baru seperti diuraikan di atas. Untuk bacaan lebih lanjut mengenai pengaruh budaya Jawa dalam membentuk ideologi gender Orde Baru lihat Ratna Saptari. "Women, Family and Household: Tensions in Culture and Practice," dalam *Women and Households in Indonesia: Cultural Notions and Social Practices*, ed. Juliette Koning, Marleen Nolten, Janet Rodenburg, Ratna Saptari, 19 (Great Britain: Curzon Press, 2000); Sylvia Tiwon, "Reconstructing Boundaries and Beyond," dalam *Women and Households in Indonesia: Cultural, Notions and Social Practices*, ed. Juliette Koning, Marleen Nolten, Janet Rodenburg, Ratna Saptari, 71-4 (Great Britain: Curzon Press, 2000).
7. Norma Sullivan, "Gender and Politics in Indonesia," dalam *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, ed. Maila Stivens, 64 (Australia: Centre of Southeast Asian Studies Monash University Aristoc Press, 1991).
8. KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Sejarah Sentengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), 279.
9. Data ini penulis klasifikasikan dari data dasar yang penulis dapatkan dari Kementerian Negara Republik Indonesia "Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Diterbitkan Keputusannya Presiden Republik Indonesia Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2005, 2006, 2007, dan Tahun 2008".
10. Ibid.
11. Pippa Noris, "Introduction: Theories of Recruitment," dalam *Passage to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*, ed. Pippa Noris, 11 (United Kingdom: Cambridge University Press, 1997).
12. Menurut tim peneliti Pemilu LIPI, sebenarnya Pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarkhi partai yang mewarnai kepolitikan di DPRD di mana kepentingan partai atau kepentingan elit partai seringkali memanipulasi kepentingan masyarakat luas. Baca lebih lanjut Tim Pemilu LIPI (Syamsuddin Haris, Sri Nuryanti, Lili Romli, Edison Muchlis, Tri Rainny Syafarani), *Analisa Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Indonesia*, ed. Sri Nuryanti (Jakarta: LIPI Press, 2006). 8. Baca juga LIPI, Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia, ed. Syamsuddin Haris (Jakarta: LIPI Press, 2007).
13. Maxine Molyneux, "Mobilization Without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua," *Feminist Studies* 11, no. 2 (Summer 1985):232-33; Caroline Moser, "Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Needs," dalam *Gender and International Relations*, ed. Rebecca Grant and Kathleen Newland, 89-90 (Suffolk: Open University Press, 1991).
14. Selain itu, contoh lain perubahan orientasi kebijakan menyangkut perempuan di Era Reformasi ke arah pemenuhan kepentingan strategis gender dapat dilihat dari perubahan orientasi program Keluarga Berencana (KB) yang pada masa Orde Baru perempuan menjadi sasaran utama program ini untuk menekan laju jumlah pertumbuhan penduduk, sementara sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid laki-laki juga menjadi sasaran program KB. Untuk paparan lebih dalam mengenai perubahan orientasi program untuk perempuan pada masa Orde Baru dan Era Reformasi dalam bingkai perubahan ideology gender, lihat tulisan Kurniawati Hastuti Dewi, "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.4, No. 1 (2007: 59-68)
15. "Pemerintah Siapkan 8 Instrumen untuk RUU Pemilu", Senin, 28 Januari 2013, <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/28/1/126637/-Pemerintah-Siapkan-8-Instrumen-untuk-RUU-Pemilu-Kada> (diakses 26 Februari 2013).
16. "Rusuh Palopo, Mendagri Percepat Pembahasan RUU Pilkada," Nasional, 1 April 2013, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/401685-rusuh-palopo-mendagri-percepat-pembahasan-ruu-pilkada> (diakses 3 April 2013)
17. Achmad Zulfikar Fazli, "Ini Daftar Perolehan Kursi DPR RI Tiap Parpol," *Metro TV News*, 14 Mei 2014, <http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/14/241830/ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol> (diakses 29 September 2014)
18. Keputusan KPU No. 536/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang "Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014," diperoleh dari http://www.kpu.go.id/koleksigambar/SK_KPU_536_2272014.pdf (diakses 30 September 2014)
19. "Fraksi Demokrat Walk out," *Kompas*, 26 September 2014, hal. 1.
20. Kurniawati Hastuti Dewi, "The Emergence of Female Politicians in Local Politics in Post-Suharto Indonesia" (PhD Dissertation, Kyoto University, Japan, 2012), 295.
21. Ibid., 298.
22. "Koalisi Perempuan Tolak Pilkada Lewat DPRD," *Detiknews*, Senin, 22 September 2014, <http://news.detik.com/read/fto/2014/09/22/193227/2697844/157/3/koalisi-perempuan-tolak-pilkada-lewat-dprd> (diakses 3 Oktober 2014)
23. Lihat Linda K Richter, "Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast Asia," *Pacific Affairs* 63, no. 4 (1990-1991): 526. Sebagai perbandingan lihat juga Mark. R. Thompson, "Female Leadership of Democratic Transition in Asia," *Pacific Affairs* 75, no. 4 (2002-2003): 535.
24. AusAID dan Kemitraan, "Temuan-temuan Utama IGI" dalam *Indonesia Governance Index 2012: "Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif"*, 23 (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013)
25. AusAID dan Kemitraan, "Temuan-temuan Utama IGI" dalam *Indonesia Governance Index 2012: "Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif"*, 25.
26. Ibid., 25.
27. Di <http://www.menegpp.go.id/V2/index.../policy-brief-versi-indonesia, hal.3> (diakses 13 Juli 2012)
28. Kutipan dari perkataan Tri Rismaharini, sebagaimana dikutip dari Ira Puspito Rini, *True Spirit Ibu Risma* (Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi, 2014), 95
29. Kurniawati Hastuti Dewi, "The Emergence of Female Politicians in Local Politics in Post-Suharto Indonesia," 292, 296.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Prof. Jeffrey Winters
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan" vii-viii

Artikel / Articles

- *Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan / Political Engineering for Women in Indonesian Governance* 257-264
Philips J. Vermonte
- *Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi / Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy* 265-270
Mariana Amiruddin
- *Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern / Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics*..... 271-277
Ryan Sugiarto
- *Kehendak Menakutkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja / Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet* 279-287
Triyono Lukmantoro
- *Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung / Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election* 289-306
Kurniawati Hastuti Dewi
- *Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik / Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics*..... 307-315
Robert Endi Jaweng
- *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan / Raison d'être of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance*..... 317-326
Dewi Candraningrum

Wawancara / Interview

- *Nafsiah Mboi: "Sikap Tegas Perlu, Tetapi Penguasaan Materi Juga Penting" / Nafsiah Mboi: "Assertiveness is necessary but competence is also crucial"* 327-332
Anita Dhewy

Kata dan Makna / Words and Meanings..... 333-334

Profil / Profile

- *Yohana Yembise: Perempuan Punya Peran Meningkatkan Ekonomi Keluarga / Yohana Yembise: Women have significant roles in increasing family's incomes"* 335-339
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- *Bagaimana Linda Gumelar Memimpin Kementerian? / How Linda Gumelar leads the Ministry?* 341-343
Nadya Karima Melati

